

# Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat



Hastuti

**LAPORAN LAPANGAN SMERU**

**Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di  
Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Hastuti

**Editor**

Wiwin Purbaningrum

**The SMERU Research Institute**

**Januari 2020**

# Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penulis: Hastuti

Editor: Wiwin Purbaningrum

Foto Sampul: Dok. SMERU

Data Katalog-dalam-Terbitan The SMERU Research Institute

Hastuti

Laporan lapangan SMERU: Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Bima - Provinsi Nusa Tenggara Barat./ Ditulis oleh Hastuti.

lv; 63 hlm.; 29 cm.

ISBN 978-602-7901-52-0 (PDF)

ISBN 978-623-7492-14-6

1. Pendidikan      2. Kabupaten Bima

I. Judul

370.7 –ddc 23

Diterbitkan oleh:

The SMERU Research Institute

Jl. Cikini Raya No. 10A

Jakarta 10330

Indonesia

Cetakan pertama, Januari 2020



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id); atau kunjungi situs web [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).

# TIM PENELITIAN

## **Peneliti SMERU**

Hastuti

## **Peneliti Lapangan**

Kartawijaya

Steve Christiantara

Rahmayati

# UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini dapat diselesaikan berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh tim Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (The Innovation for Indonesia's School Children, INOVASI) yang telah memfasilitasi dan memberi arahan teknis selama pelaksanaan penelitian ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, khususnya bupati, sekretaris daerah, kepala badan/dinas di bidang pendidikan beserta stafnya, yang telah memperlancar dan memberikan informasi berharga sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada para informan kunci di bidang pendidikan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa atas informasinya yang berharga. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid yang telah bersedia meluangkan waktu mereka untuk diwawancarai. Terakhir, kami berterima kasih kepada para peneliti di Kabupaten Bima dan peneliti tamu yang telah membantu tim peneliti SMERU dalam melakukan wawancara dan diskusi kelompok terfokus untuk mengumpulkan informasi di lapangan.

## Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hastuti

Kualitas hasil pembelajaran, terutama kemampuan numerasi dan literasi, murid pendidikan dasar di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemerintah Australia yang diwakili Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) menggagas Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) yang akan dilaksanakan selama empat tahun. Untuk mendukung program tersebut, INOVASI bekerja sama dengan SMERU dalam melakukan studi diagnostik terhadap sistem pendidikan dasar di beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan salah satunya adalah Kabupaten Bima. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan informasi dikumpulkan melalui wawancara individu, wawancara kelompok, dan diskusi kelompok terfokus atau FGD yang dilakukan pada 18–30 Juli 2016. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pendidikan dasar di Kabupaten Bima, yaitu rendahnya kualitas guru, rendahnya komitmen dan profesionalisme guru, kurangnya pelatihan untuk guru, kurang dan tidak meratanya guru PNS, kurang dan tidak meratanya sarana dan prasarana sekolah, rendahnya minat baca dan minat belajar murid, rendahnya dukungan orang tua, kuatnya pengaruh sosial-politik, dan kurangnya anggaran pendidikan. Hampir semua permasalahan tersebut merupakan penyebab rendahnya kualitas hasil pembelajaran. Pemerintah daerah sudah melakukan beberapa inovasi terkait pendidikan, tetapi dampaknya belum terlihat karena inovasi tersebut belum lama dilaksanakan atau jangkauan sasarannya terbatas. Bidang pendidikan dasar melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari latar belakang kelembagaan yang berbeda dengan tingkat ketertarikan, pengaruh, dan kewenangan untuk menyelesaikan masalah atau membuat keputusan yang juga bervariasi. Di antara lembaga-lembaga pemangku kepentingan tersebut terjalin jaringan komunikasi formal dan informal dalam bentuk laporan, pengawasan/kontrol, perintah/komando, koordinasi, dan pemberian masukan.

Kata kunci: pendidikan dasar, permasalahan, inovasi, kelembagaan

# DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Metode Penelitian	1
II. ANALISIS EKONOMI POLITIK TENTANG PERMASALAHAN PENDIDIKAN DASAR	3
III. ANALISIS INOVASI PEMBELAJARAN DI KABUPATEN BIMA	10
IV. PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBELAJARAN: KETERTARIKAN DAN PENGARUH	12
4.1 Pemangku Kepentingan yang Berwenang Menyelesaikan Masalah	12
4.2 Ketertarikan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan	13
4.3 Jejaring Pemangku Kepentingan	14
LAMPIRAN	15

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Sepuluh Isu Utama Berdasarkan Kelompok Pemangku Kepentingan	16
Lampiran 2	Metode Komunikasi Pemangku Kepentingan dan Umpan Balik	26
Lampiran 3	Tabel A1. Daftar Mitra Daerah Potensial dan Ringkasan Wawancara	30
Lampiran 4	Tabel A2. Matriks Nilai Pemangku Kepentingan	33
Lampiran 5	Gambar A1. Peta Pemangku Kepentingan	40
Lampiran 6	Gambar A2. Analisis Jejaring Pemangku Kepentingan	41
Lampiran 7	Tabel A3. Metode Komunikasi Informan	42
Lampiran 8	Gambar A3. Analisis Pohon Masalah	46
Lampiran 9	Tabel A4. Analisis Penyelesaian Masalah: Lembaga yang Memiliki Kewenangan dalam Penyelesaian Masalah	48
Lampiran 10	Tabel A5. Kebijakan/Program/Inovasi di Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Sejak 2005	49
Lampiran 11	Tabel A6. Basis Data Inovasi Daerah Kabupaten Bima	51
Lampiran 12	Data Sekunder	57
Lampiran 13	Tabel A7. Diagram Proses Pemetaan Pemangku Kepentingan	58
Lampiran 14	Status Guru di Kabupaten Bima	62

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKD	Badan Kepegawaian Daerah
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade
Dinas Dikpora	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
FGD	<i>focus group discussion</i> (diskusi kelompok terfokus)
INOVASI	Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KKG	kelompok kerja guru
MGMP	musyawarah guru mata pelajaran
NTB	Nusa Tenggara Barat
ornop	organisasi nonpemerintah
PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia
PNS	pegawai negeri sipil
PR	pekerjaan rumah
sekda	sekretaris daerah
SD	sekolah dasar
SMP	sekolah menengah pertama
UPTD	unit pelaksana teknis dinas

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tingkat partisipasi pendidikan dasar di Indonesia sudah cukup tinggi, tetapi kualitas hasil pembelajarannya, terutama kemampuan numerasi dan literasi, masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemerintah Australia yang diwakili Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) bersepakat untuk menggagas Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI). Program ini akan dilaksanakan selama empat tahun dengan tujuan mengumpulkan bukti tentang apa yang berhasil dan dalam situasi bagaimana hasil belajar murid pendidikan dasar meningkat, serta memfasilitasi pemanfaatan bukti tersebut untuk memperbaiki kebijakan pendidikan dan praktik pembelajaran. Pendekatan untuk mencapai tujuan program tersebut terdiri atas empat komponen, yaitu pemantauan, evaluasi, penelitian, dan pembelajaran dengan fokus pada aspek (i) kualitas pengajaran di kelas, (ii) dukungan pengajaran berkualitas, dan (iii) kepastian bahwa semua anak belajar.

Untuk mendukung program tersebut, INOVASI bekerja sama dengan SMERU, melakukan studi diagnostik terhadap sistem pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tujuan studi ini adalah:

- a) memahami konteks sosial-politik dan ekonomi pada ekosistem pendidikan yang ada;
- b) mengetahui pemangku kepentingan yang relevan, kedudukan mereka, dan pengaruh mereka dalam suatu ekosistem pendidikan; dan
- c) mengetahui sejarah atau perkembangan kebijakan dan inovasi pendidikan yang terjadi dengan fokus pada pembelajaran murid, khususnya terkait literasi dan numerasi di tingkat pendidikan dasar yang mencakup sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Terdapat enam kabupaten di Provinsi NTB yang dipilih Kemendikbud dan DFAT sebagai mitra pertama untuk melaksanakan Program INOVASI, yaitu Bima, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu. Laporan ini adalah laporan hasil studi di Kabupaten Bima.

## 1.2 Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informasi dikumpulkan melalui wawancara individu, diskusi kelompok, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*). Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman diskusi kelompok, dan panduan FGD. Pemilihan informan dilakukan di Jakarta, dan peneliti dapat menambah jumlah informan jika dianggap penting untuk menambah informasi. Sekolah yang dikunjungi ditentukan oleh Tim INOVASI dengan menggunakan metode tertentu. Desa dan kecamatan lokasi penelitian ditentukan melalui pendekatan letak sekolah, yakni desa dan kecamatan tempat SD terpilih.

Di tingkat kabupaten, dilakukan wawancara mendalam dengan para informan dari kantor sekretaris daerah (sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora), Dewan Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), organisasi nonpemerintah (ornop), dan media lokal. Selain itu, dilakukan FGD dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik yang menjadi informan wawancara mendalam maupun tidak. Di tingkat kecamatan, wawancara mendalam dilakukan terhadap kepala unit pelaksana teknis dinas (UPTD)

pendidikan dan pengawas sekolah yang menjadi pengawas di sekolah yang dikunjungi. Sementara itu, di tingkat desa wawancara mendalam dilakukan terhadap kepala desa. Di tingkat sekolah, dilakukan wawancara terhadap kepala sekolah dan komite sekolah, serta wawancara kelompok terhadap guru, orang tua, dan murid.

Untuk mendukung data dan informasi primer, studi ini juga mengumpulkan berbagai dokumen terkait profil pendidikan kabupaten studi yang tertuang dalam dokumen rencana kerja (renja), rencana strategis (renstra), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) instansi pendidikan tingkat kabupaten. Selain itu, studi ini juga mengumpulkan dokumen kabupaten dalam angka dan dokumen kebijakan yang relevan.

Kunjungan lapangan dan pengumpulan data dilakukan oleh empat peneliti pada 18–30 Juli 2016. Sekolah yang dikunjungi berjumlah empat yang terdiri atas dua SD dan dua SMP yang semuanya berstatus sekolah negeri. Secara keseluruhan, informasi dalam studi di Kabupaten Bima ini dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dengan 24 pemangku kepentingan tingkat kabupaten hingga sekolah (16 diskusi kelompok dengan 4 kelompok guru, 4 kelompok orang tua murid, 4 kelompok murid perempuan, dan 4 kelompok murid laki-laki) dan 1 FGD di tingkat kabupaten.

## II. ANALISIS EKONOMI POLITIK TENTANG PERMASALAHAN PENDIDIKAN DASAR

Permasalahan pendidikan dasar di tingkat sekolah dan wilayah penelitian yang disampaikan informan bervariasi. Oleh karena itu, untuk mempermudah analisis, permasalahan diolah berdasarkan kelompok informan, yaitu kelompok pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pendukung kebijakan. Permasalahan yang disampaikan setiap kelompok informan hampir sama (lihat Lampiran 1). Secara umum, permasalahan utama yang paling sering disampaikan informan adalah sebagai berikut.

### a) Kualitas guru rendah

Di Kabupaten Bima, terdapat guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), honorer daerah (honda), dan sukarela (lihat Lampiran 14). Kualitas guru, baik guru PNS, honda, maupun sukarela, dinilai masih rendah oleh semua kelompok informan. Secara akademis, sebagian besar guru PNS di tingkat kabupaten dan sekolah yang dikunjungi sudah memenuhi standar karena berlatar belakang sarjana (S-1), tetapi kemampuan sebagian besar guru dinilai masih di bawah standar. Gelar sarjana yang dimiliki sebagian besar guru bukan sarjana kependidikan. Persyaratan sertifikasi yang tidak mensyaratkan guru memiliki gelar sarjana kependidikan dianggap sebagai salah satu penyebabnya.<sup>1</sup>

Penempatan atau mutasi guru juga dianggap sebagai penyebab rendahnya kualitas guru karena prosesnya kurang memperhatikan kebutuhan sekolah, khususnya untuk tingkat SMP yang menggunakan guru mata pelajaran. Di salah satu SMP yang dikunjungi, misalnya, guru IPS mengajar muatan lokal dan guru bahasa Indonesia mengajar bahasa Inggris. Akibatnya, kemampuan mengajar guru tersebut kurang baik, meskipun mereka mempelajari pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya secara autodidak sebelum mengajar. Pada umumnya, guru honda dan sukarela berlatar belakang pendidikan S-1 dan sebagian besar memiliki gelar sarjana kependidikan. Namun, gaji mereka yang sangat minim menyebabkan konsentrasi mereka terbagi antara mengajar dan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

### b) Komitmen dan profesionalisme guru rendah

Banyak informan menilai bahwa komitmen, motivasi, dan profesionalisme guru masih rendah. Sebagian besar guru hanya mengajar untuk memenuhi kewajiban tanpa upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Mereka kurang memperhatikan tingkat pemahaman murid mengenai bahan ajarnya. Berdasarkan hasil wawancara kelompok dengan murid, ada guru yang hanya menulis di papan tulis untuk disalin oleh murid tanpa memberi penjelasan. Bahkan, ada guru yang sering tidak hadir di kelas pada jam pelajaran.

Kemauan guru untuk meningkatkan kemampuan mengajar secara mandiri dan motivasi untuk menjadi tenaga pendidik berkualitas juga masih rendah. Informan mengatakan bahwa usia sebagian guru PNS yang mendekati pensiun menjadi salah satu penyebabnya. Banyak informan mengakui bahwa ada kecenderungan guru PNS kurang disiplin dan malas mengajar. Tugas mengajarnya sering kali digantikan oleh guru sukarela yang ada di sekolah tersebut.

---

<sup>1</sup> Beberapa tahun yang lalu, banyak guru yang belum bergelar sarjana berupaya meraih gelar sarjana. Mereka sembarangan dalam memilih jurusan atau universitas. Hal terpenting bagi mereka adalah lulus dan mendapatkan gelar sarjana sebagai syarat formal program sertifikasi guru.

Banyak informan, termasuk peserta FGD kabupaten, mengakui bahwa keberadaan tunjangan sertifikasi guru yang menyebabkan penghasilan guru menjadi hampir dua kali lipat tidak berbanding lurus dengan peningkatan komitmen, motivasi, dan profesionalisme guru. Tambahan tunjangan keterpencilan sebanyak satu kali gaji juga tidak berdampak; lagi pula, tunjangan tersebut biasanya tidak berlaku untuk semua guru yang mengajar di sekolah yang sama. Guru yang sebelumnya mendapatkan tunjangan keterpencilan juga belum tentu mendapatkannya lagi pada tahun berikutnya tanpa alasan jelas.

### c) Pelatihan guru kurang dan tidak merata

Pelatihan guru yang diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas mengajar dianggap masih sangat kurang. Kalaupun ada pelatihan, terdapat kecenderungan bahwa hanya guru tertentu atau guru mata pelajaran tertentu yang dipilih oleh Dinas Dikpora. Penyebaran ilmu oleh guru yang mendapatkan pelatihan kepada guru-guru lain juga masih sangat rendah atau bahkan tidak ada. Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi pada guru sukarela yang tidak pernah mendapatkan pelatihan.

Upaya berbagi pengalaman dan peningkatan kompetensi guru sebenarnya bisa dilakukan melalui wadah pertemuan guru-guru, seperti musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk guru SMP dan kelompok kerja guru (KKG) untuk guru SD. Akan tetapi, pada praktiknya guru-guru yang seharusnya melakukan pertemuan tiap minggu di tingkat gugus atau wilayah tersebut jarang melakukan pertemuan melalui wadah tersebut. Bahkan, wadah tersebut bisa dikatakan mati suri karena biasanya hanya menyelenggarakan pertemuan menjelang ulangan semester untuk keperluan pembuatan bahan ulangan. Menurut kepala sekolah yang menjadi informan, MGMP dan KKG tersebut tidak berjalan karena keterbatasan anggaran sekolah. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kegiatan tersebut dinilai masih kurang karena banyaknya kebutuhan lain. Selain itu, ketersediaan waktu guru-guru juga terbatas, atau mereka enggan meluangkan waktu untuk kegiatan tersebut. Salah satu penyebab terbatasnya waktu guru adalah bahwa kegiatan KKG yang diagendakan setiap Sabtu bertolak dengan jadwal pertemuan guru di tingkat sekolah. Sementara itu, guru enggan meluangkan waktu atau tidak termotivasi karena orang yang menyampaikan materi dalam kegiatan tersebut biasanya adalah orang yang sama. Informan memperkirakan bahwa para guru akan lebih bersemangat jika pemberi materi berasal dari kabupaten atau provinsi.

### d) Distribusi guru PNS tidak merata

Penyebaran guru PNS antarsekolah dan antarwilayah kurang merata. Guru PNS cenderung terkonsentrasi di wilayah yang relatif lebih mudah diakses, seperti wilayah kota dan sekitarnya, sementara di wilayah terpencil jumlah guru PNS masih terbatas. Hal ini terjadi karena, pada umumnya, guru-guru lebih berminat untuk ditempatkan di wilayah perkotaan. Menurut beberapa informan, guru yang bertugas di daerah terpencil sering kali kembali ke kota dan meninggalkan pekerjaannya karena alasan akses yang tidak mendukung. Tidak meratanya distribusi guru PNS terjadi di sekolah yang dikunjungi dan proporsinya cenderung berbanding terbalik dengan keterpencilan wilayah. Proporsi guru PNS di SD yang lokasinya dekat dengan ibu kota kabupaten 60%, sedangkan di SD yang lokasinya lebih jauh proporsinya hanya 29%. Proporsi guru PNS di SMP yang lokasinya lebih mudah diakses adalah 40%, sementara di SMP yang lokasinya agak terpencil dan di perbukitan proporsinya hanya 5%.

Penempatan guru PNS merupakan wewenang Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Penempatan tersebut seharusnya mempertimbangkan kebutuhan wilayah/sekolah berdasarkan informasi

dari lembaga terkait. Namun, menurut berbagai sumber, pada pelaksanaannya penempatan guru sangat dipengaruhi oleh aspek sosial-politik.

#### e) Guru PNS kurang dan guru sukarela terlalu banyak

Jumlah guru PNS secara keseluruhan dan di sebagian besar sekolah masih kurang. Kondisi ini terjadi terutama di sekolah yang aksesnya agak sulit. Di SMPN B, misalnya, dari 20 guru, hanya 1 orang berstatus guru PNS. Proporsi guru PNS untuk tingkat SD dan SMP di tingkat kabupaten adalah 37%, sedangkan di tiap sekolah yang dikunjungi proporsinya 5%–60% dari jumlah guru.

Kurangnya guru PNS menyebabkan sekolah merekrut banyak guru sukarela untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Namun, dalam perkembangannya, perekrutan guru sukarela tersebut tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sekolah, tetapi juga karena ada tekanan dari pihak lain. Tidak jarang kepala sekolah menerima guru sukarela, meskipun sedang tidak membutuhkan, atau menerima guru dengan latar belakang yang tidak sesuai kebutuhan karena ada “titipan” dari pihak tertentu yang memiliki kewenangan. Banyaknya sarjana kependidikan lulusan baru (di Bima, sarjana kependidikan diperkirakan bertambah lebih dari 1.000 orang per tahun) telah memperbesar desakan terhadap kepala sekolah. Komposisi guru sukarela yang tinggi tersebut menjadi penghalang peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran karena adanya keterbatasan honorarium yang disediakan sekolah sehingga mengurangi semangat dan motivasi guru sukarela.

#### f) Sarana dan prasarana sekolah kurang memadai dan tidak merata

Sarana dan prasarana di sekolah pada umumnya masih kurang memadai. Banyak sekolah belum memiliki sejumlah ruangan/bangunan sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti ruang perpustakaan dan laboratorium. Bahkan, salah satu SMP yang dikunjungi hanya memiliki tiga ruangan sehingga ada ruangan yang harus disekat dan sekaligus digunakan sebagai ruang kelas, ruang guru, dan ruang kepala sekolah. Selain itu, ada juga sekolah dengan kondisi bangunan yang perlu direnovasi atau jumlah kursi dan meja yang perlu ditambah supaya sesuai dengan jumlah murid. Di sekolah ini, meja yang seharusnya digunakan oleh dua murid terpaksa digunakan oleh tiga murid. Hal tersebut tentu saja berpengaruh pada kenyamanan dan konsentrasi belajar murid yang kemudian dapat berdampak pada kualitas hasil pembelajaran mereka. Kurang memadainya sarana dan prasarana tersebut disebabkan kurangnya anggaran untuk bidang pendidikan.

Selain jumlahnya kurang, distribusi dan kondisi sarana dan prasarana antarsekolah juga tidak merata. Ada sekolah yang ruangan-ruangannya relatif lengkap atau kondisi bangunannya bagus, tetapi ada juga sekolah yang ruangnya masih kurang atau kondisi bangunannya perlu direnovasi seperti yang terjadi di sekolah yang dikunjungi. Menurut beberapa informan, dalam hal distribusi bantuan sarana dan prasarana, ada sekolah yang terus-menerus mendapat bantuan dan ada sekolah yang sangat jarang menerima bantuan. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya faktor sosial-politik dalam penentuan sekolah sasaran penerima bantuan. Penyebab lainnya adalah terbatasnya anggaran sehingga muncul mekanisme pemilihan sekolah sasaran yang menyebabkan tidak semua sekolah dapat menerima bantuan.

#### g) Peralatan dan perlengkapan sekolah kurang memadai dan tidak merata

Perlengkapan sekolah, seperti alat peraga, buku perpustakaan, peralatan laboratorium, dan alat olah raga, masih minim. Ketersediaan buku pelajaran pun masih kurang. Seperti halnya dengan sarana dan prasarana sekolah, peralatan dan perlengkapan sekolah tidak merata antarsekolah.

Pemerintah memang menyediakan biaya pembelian buku cetak dari Program BOS, tetapi dana tersebut dinilai belum bisa memenuhi semua kebutuhan. Selain itu, pencairan dana BOS tidak tepat pada awal tahun pelajaran sehingga sekolah terpaksa menggunakan buku tahun pelajaran sebelumnya yang jumlahnya sudah berkurang karena hilang atau rusak. Oleh karena itu, sekolah tidak bisa menyediakan satu buku untuk satu murid, melainkan satu buku untuk dua murid atau lebih.

Terkait ketersediaan buku, beberapa orang tua di satu sekolah yang dikunjungi yang mempunyai perhatian lebih terhadap kondisi pendidikan putra-putrinya juga mengeluhkan rendahnya ketersediaan buku pendukung pelajaran. Kondisi ini terjadi bukan hanya di tingkat sekolah dan sekitarnya, melainkan di tingkat Kabupaten Bima dan/atau Kota Bima. Toko buku di wilayah ini sangat terbatas dan jenis buku yang dijual juga terbatas. Oleh karena itu, beberapa orang tua terkadang membeli buku penunjang pelajaran ketika berkunjung ke wilayah lain, khususnya wilayah di Pulau Jawa. Buku tersebut biasanya difotokopi oleh murid-murid lain yang membutuhkan buku penunjang.

#### h) Minat baca dan minat belajar murid rendah

Rendahnya minat baca dan belajar murid dikeluhkan oleh banyak informan di semua tingkat, mulai dari kabupaten hingga sekolah, dan bahkan oleh kelompok guru dan murid sendiri. Rendahnya minat baca disebabkan oleh, antara lain, kurangnya bahan bacaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Di sekolah yang sudah memiliki perpustakaan, buku yang tersedia masih kurang dan sebagian besar merupakan buku lama sehingga kurang menarik minat murid untuk membaca. Ada juga sekolah yang membatasi akses murid terhadap perpustakaan, misalnya hanya satu kali dalam seminggu. Menurut kelompok wawancara orang tua, rendahnya minat baca juga dipengaruhi oleh tidak adanya kebiasaan atau budaya membaca di dalam keluarga.

Rendahnya minat baca murid tersebut berpengaruh kuat pada rendahnya minat dan semangat belajar mereka. Menurut beberapa informan, murid malas belajar dan bahkan ada yang sering membolos. Para murid pada beberapa kelompok diskusi juga mengakui hal tersebut. Mereka lebih memilih bermain bersama teman atau menonton televisi daripada belajar. Jika ada pekerjaan rumah (PR) yang sulit, beberapa murid lebih memilih untuk mengerjakan sekadarnya daripada bertanya kepada teman, apalagi kepada guru. Waktu yang digunakan murid untuk menonton televisi cukup lama. Mereka bisa menonton televisi sejak pulang sekolah hingga malam hari sehingga mengganggu waktu belajar mereka di rumah. Di dua sekolah yang dikunjungi, kondisi ini mungkin terjadi karena listrik baru masuk desa sekitar dua tahun lalu sehingga menonton televisi masih merupakan sesuatu yang berharga. Di samping itu, tidak adanya hiburan lain juga menyebabkan besarnya ketergantungan pada televisi.

#### i) Dukungan orang tua rendah

Kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya sudah cukup bagus. Sebagian besar anak muda berpendidikan SMA, bahkan ada yang kuliah atau memperoleh gelar sarjana. Namun, dukungan, perhatian, dan kontrol orang tua terhadap kualitas pembelajaran anak masih rendah. Banyak orang tua yang menganggap bahwa tugas pembelajaran adalah tugas sekolah. Orang tua tidak memberikan motivasi kepada anak untuk bersekolah secara sungguh-sungguh. Bahkan, ketika ada sekolah yang menyediakan les tambahan secara gratis, ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti les tersebut.

Rendahnya dukungan orang tua juga dapat dilihat dari masih banyaknya orang tua yang melibatkan anaknya dalam kegiatan usaha sehingga anak membolos. Di hampir seluruh

wilayah Kabupaten Bima, terutama di daerah perdesaan, orang tua biasa melibatkan anak dalam kegiatan pertanian dan perikanan laut. Pada kedua kelompok usaha tersebut, ada periode yang membutuhkan tenaga tambahan, yaitu saat musim tanam dan panen pada usaha pertanian dan saat musim melaut pada usaha perikanan laut. Banyak petani dan nelayan yang tidak mampu membayar tenaga dari luar keluarga sehingga mereka mempekerjakan anak-anak kendati anak-anak tersebut harus membolos sekolah selama beberapa hari. Tidak jarang pula petani di Kabupaten Bima memiliki lahan yang jauh dari tempat tinggalnya, bahkan sampai di luar wilayah kabupaten, sehingga anaknya harus membolos sekolah lebih lama lagi. Pada kasus lahan pertanian yang jauh, terkadang pelibatan anak tidak hanya karena pertimbangan kebutuhan tenaga tambahan, melainkan juga karena pertimbangan kepraktisan dan keamanan. Anak, terutama yang masih kecil seperti usia SD, dibawa serta ke kebun karena di rumah tidak ada yang mengurus atau menjaga mereka. Pada kasus anak yang membolos sekolah karena membantu usaha orang tua, sekolah tidak dapat memberikan sanksi karena khawatir akan konsekuensinya bahwa anak akan berhenti sekolah atau orang tuanya marah; apalagi, di wilayah ini sekolah cenderung kekurangan murid.

Dukungan orang tua dalam hal dana untuk memenuhi kebutuhan sekolah juga makin rendah. Menurut para informan, setelah adanya BOS dan BSM, orang tua cenderung menganggap bahwa seluruh biaya yang dibutuhkan terkait pembelajaran dan sekolah sudah terpenuhi dari dana tersebut. Orang tua juga pada umumnya beranggapan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah. Di salah satu sekolah yang dikunjungi, orang tua di bawah koordinasi komite sekolah masih bersedia membantu mendanai pembangunan pagar dan parit sekolah. Hal itu terjadi mungkin karena masih ada rasa kepemilikan masyarakat yang besar akan satu-satunya SMP di wilayah tersebut yang jumlah ruangnya pun masih terbatas.

#### j) Pengaruh sosial-politik kuat

Sejak dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah pada 2000, roda dunia pendidikan di Kabupaten Bima sangat dipengaruhi muatan sosial-politik lokal. Berbagai kebijakan daerah terkait pendidikan dipengaruhi kepentingan sosial-politik lembaga atau tokoh yang memiliki kewenangan, terutama kepala daerah terpilih dan tim suksesnya.

Pengaruh sosial-politik yang paling kental dapat dilihat dalam pengangkatan dan penempatan SDM, mulai dari tingkat pucuk pimpinan lembaga hingga tenaga guru. Terlepas dari kompetensi dalam melakukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), pengangkatan dan penempatan SDM tersebut sering kali tidak memperhatikan prestasi atau kesesuaian latar belakang pendidikan dan pengalaman. Dalam FGD kabupaten sempat terungkap bahwa beberapa jabatan pucuk pimpinan di Dinas Dikpora ditempati oleh pejabat yang tidak mempunyai latar belakang atau pengalaman di bidang pendidikan. Dalam penempatan dan pengangkatan SDM di tingkat yang lebih rendah, seperti kepala UPTD, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru, kedekatan dengan pejabat berwenang, terutama dengan bupati terpilih dan tim suksesnya, merupakan faktor yang sangat menentukan. Menurut beberapa informan, kedekatan dengan anggota legislatif juga menentukan. Sebagai gambaran besarnya pengaruh sosial-politik, terdapat informasi bahwa pada dua pelantikan kepala sekolah beberapa tahun lalu (masing-masing dilantik 15 dan 16 kepala sekolah) hanya 1–2 kepala sekolah yang diangkat tanpa dipengaruhi kedekatan sosial-politik dengan pejabat berwenang.

Akibat kentalnya pengaruh sosial-politik dalam pengangkatan dan penempatan SDM, pada umumnya SDM di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Bima terlibat dalam kegiatan politik praktis, khususnya pada saat pilkada dan pemilu. Mereka terpaksa terlibat dalam kegiatan politik praktis sebagai upaya untuk mengamankan atau meningkatkan kedudukan mereka kendati terdapat banyak ketidakpastian. Mereka melakukan hal tersebut karena berada pada

posisi terjepit. Mereka yang tidak terlibat politik praktis sama sekali harus siap kehilangan jabatan setelah pilkada atau pemilu. Sementara itu, jika mereka terlibat, masih ada kemungkinan bahwa kedudukan mereka aman kalau calon yang mereka dukung menang dalam pemilihan. Keterlibatan dalam politik praktis biasanya berupa dukungan dalam kampanye, seperti menyediakan sarana kampanye (menyewa mobil) dan mengajak masyarakat atau kalangan di sekitar mereka untuk memilih calon tertentu. Pada saat kunjungan lapangan dilakukan, para informan, baik yang mendukung bupati terpilih maupun yang tidak, menyatakan bahwa mereka sudah siap dengan keputusan mutasi yang biasanya dilakukan enam bulan setelah pengangkatan kepala daerah terpilih, atau sekitar Agustus 2016.

Menurut beberapa informan, besarnya pengaruh sosial-politik ini juga menyebabkan tidak meratanya distribusi guru PNS yang cenderung menumpuk di wilayah perkotaan atau wilayah yang mudah diakses dan tidak meratanya distribusi bantuan antarsekolah, termasuk distribusi sarana dan prasarana. Ada juga informan yang menyampaikan bahwa pengaruh sosial-politik menyebabkan rendahnya kualitas sebagian besar kepala sekolah. Kepala sekolah cenderung diangkat dari guru pendukung kepala daerah terpilih, bukan dari guru yang berkualitas.

Terdapat kemungkinan bahwa pengaruh sosial-politik juga mengakibatkan komposisi SDM bidang pendidikan kurang proporsional. Dalam hal ini, terjadi penggelembungan di posisi pengawas sekolah. Proporsi antara pengawas SD dan sekolah di kecamatan studi 1:5, padahal seharusnya menurut standar sertifikasi 1:10. Di Kabupaten Bima, jumlah pengawas SMP seharusnya hanya 25 orang tetapi ternyata terdapat 45 orang. Banyaknya pengawas sekolah tersebut diperkirakan karena adanya kenaikan pangkat atau jabatan para guru dan kepala sekolah yang tidak lagi memperhatikan kebutuhan.<sup>2</sup> Sementara itu, posisi selain pengawas yang mungkin dapat ditempati oleh kepala sekolah yang naik pangkat hanya tersedia di kantor Dinas Dikpora kabupaten yang jumlah kursi atau kesempatannya sangat terbatas. Sebagai solusi atas kelebihan jumlah pengawas dan agar para pengawas tetap dapat memenuhi persyaratan jam kerja atau persyaratan sertifikasi jabatan, pemerintah daerah menetapkan kebijakan bahwa satu sekolah diawasi oleh dua pengawas dengan tupoksi yang berbeda, yakni pengawas akademik dan pengawas manajemen sekolah.

#### k) Anggaran pendidikan kurang

Secara keseluruhan, menurut informan tingkat kabupaten, anggaran pendidikan di Kabupaten Bima cukup besar, yaitu mencapai 40% dari APBD. Namun, sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai karena jumlah guru PNS dan pegawai Dinas Dikpora mencapai kurang lebih 5.400 orang atau sekitar 57% dari jumlah total pegawai pemda. Sementara itu, anggaran untuk biaya operasional diperkirakan hanya 2,4% dari APBD. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya bantuan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, dan kegiatan/bantuan pendukung pendidikan lainnya.

#### l) Masalah lainnya

Secara umum, tidak terdapat masalah terkait akses masyarakat terhadap pendidikan, khususnya untuk tingkat SD dan SMP. Namun, khusus bagi masyarakat di wilayah perdesaan atau terpencil, akses mereka terhadap pendidikan masih agak terbatas. Sekolah tingkat SMP pada umumnya hanya terdapat di pusat kecamatan, dan sekolah tingkat SD hanya terdapat di pusat desa. Meskipun anak-anak bisa bersekolah, mereka cenderung lelah ketika tiba di

---

<sup>2</sup>Pengawas merupakan jabatan yang berada di tingkat pertengahan yang biasanya diraih setelah melewati tahapan sebagai guru dan kepala sekolah.

sekolah karena jarak tempuh dari rumah ke sekolah cukup jauh dan pada umumnya ditempuh dengan berjalan kaki. Akibatnya, mereka kurang optimal dalam menyerap materi pelajaran.

Akses terhadap pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus juga masih sangat terbatas. Di tingkat kabupaten, hanya terdapat satu SLB tingkat SD yang berstatus negeri. Bahkan, SLB tingkat SMP hanya ada di ibu kota provinsi. Sekolah inklusif untuk anak berkebutuhan khusus ada di beberapa SD. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh, sekolah tersebut tidak berjalan karena tidak ada murid. Anak berkebutuhan khusus, terutama mereka yang kemampuan belajarnya lemah, biasanya dimasukkan ke sekolah umum. Ada sekolah yang memberikan perlakuan khusus, seperti memberikan pelajaran tambahan, tetapi pada umumnya sekolah memperlakukan murid yang lemah ini sama seperti murid lainnya sehingga mereka ketinggalan pelajaran.

Berkaitan dengan permasalahan kualitas pendidikan dasar, pada umumnya informan wawancara mendalam dan wawancara kelompok tidak mengemukakan bahwa kualitas hasil pembelajaran merupakan permasalahan yang terdapat di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan sekolah yang dikunjungi. Hampir semua informan menyatakan bahwa kualitas pembelajaran di wilayah tersebut baik-baik saja. Salah satu tolok ukurnya adalah tingkat kelulusan dan kemampuan murid dalam mengikuti berbagai kompetisi. Namun, ketika diperlihatkan hasil penelitian 2013 yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi murid SD dan SMP di Provinsi NTB relatif rendah, semua informan mengakui adanya permasalahan tersebut. Mereka mengakui bahwa rendahnya kemampuan numerasi dan literasi murid pendidikan dasar terjadi juga di Kabupaten Bima dan di sekolah yang menjadi sampel penelitian ini.

Rendahnya kemampuan numerasi dan literasi tidak hanya terjadi di tingkat SD, tetapi juga terjadi di tingkat SMP. Bahkan, para murid SMP yang terlibat dalam wawancara kelompok mengakui bahwa ada beberapa teman mereka di kelas 9 yang belum lancar dalam membaca. Hal yang sama terjadi pada kemampuan berhitung. Dari hasil wawancara kelompok murid, banyak murid menyatakan matematika sebagai pelajaran yang paling tidak disukai karena susah dimengerti dan rumusnya sulit dihafalkan.

Hampir semua permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan dasar merupakan penyebab rendahnya kualitas hasil pembelajaran. Permasalahan-permasalahan tersebut sebagian saling terkait (permasalahan yang satu menjadi penyebab munculnya permasalahan lain, dan sebaliknya). Secara garis besar, dari semua permasalahan pendidikan dasar tersebut, empat permasalahan utama penyebab rendahnya hasil pembelajaran murid pendidikan dasar di Kabupaten Bima adalah kualitas guru yang rendah, minat baca dan belajar murid yang rendah, sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai, dan distribusi guru yang tidak merata. Penyebab tiap permasalahan utama tersebut dapat dilihat pada analisis pohon masalah yang disajikan pada Lampiran 8.

Keempat permasalahan utama tersebut juga merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Informan tidak menyatakan urutan penyelesaian masalah secara pasti. Akan tetapi, jika diurutkan berdasarkan seringnya disebutkan informan sebagai permasalahan utama yang harus segera diselesaikan, urutan tingkat kepentingan penyelesaiannya adalah kualitas guru, distribusi guru, sarana dan prasarana, serta minat murid. Para informan juga menyatakan bahwa ketersediaan anggaran dan kuatnya pengaruh sosial-politik merupakan masalah yang cukup penting untuk segera diselesaikan karena keduanya berpengaruh pada penyelesaian permasalahan lainnya.

### III. ANALISIS INOVASI PEMBELAJARAN DI KABUPATEN BIMA

Pemda Kabupaten Bima sudah melakukan beberapa inovasi/program/kebijakan terkait pendidikan dasar. Inovasi/program/kebijakan yang berhasil ditelusuri berjumlah 12, dan yang paling awal mulai dilaksanakan pada 2012. Pada tahun-tahun sebelumnya, boleh jadi tidak ada inovasi/program/kebijakan khusus dari dan oleh daerah karena pemda hanya melaksanakan program/kebijakan dari pusat. Inovasi/program/kebijakan sebelumnya mungkin ada, tetapi informan yang ditemui tidak mempunyai informasi terkait hal ini. Dari 12 inovasi/program/kebijakan yang berhasil ditelusuri tersebut, 8 di antaranya berkaitan dengan pembelajaran, yaitu:

a) Kabupaten Layak Anak

Program ini merupakan replikasi dari program pusat dan provinsi. Program ini berusaha meningkatkan kemampuan membaca dan berhitung. Salah satu programnya adalah membuat perpustakaan daerah, perpustakaan di kecamatan, dan perpustakaan keliling.

b) Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan No. 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Perda ini merupakan inovasi daerah berdasarkan masukan masyarakat melalui program ornop yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah daerah dan DPRD menjadi produk hukum.

c) Peraturan Bupati (Perbup) No. 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan

Perbup ini merupakan peraturan daerah yang dibuat untuk menguatkan SPM pendidikan nasional sehingga bisa efektif dijalankan di Kabupaten Bima.

d) Tenaga Kontrak Khusus (bagi 30 orang guru SD)

Kebijakan ini merupakan kebijakan perekrutan guru honorer daerah yang dinilai berkualitas untuk ditempatkan di daerah yang termasuk 3T (terbelakang, tertinggal, terisolasi). Mereka mendapatkan honorarium Rp1.500.000 per bulan, ditambah tunjangan 3T sebesar Rp1.000.000 per bulan.

e) Bima Mengajar

Program ini merupakan replikasi dari Program Indonesia Mengajar yang merekrut tenaga potensial sebagai pendidik untuk ditempatkan di daerah terpencil yang terdapat di sepuluh kecamatan.

f) Ruang Berbagai Ilmu (RUBI)

Program ini merupakan inisiatif gerakan sosial yang memfasilitasi relawan pendidikan dari pusat yang ingin berbagi ilmu, keahlian, dan keterampilan dengan guru di Kabupaten Bima. Guru-guru terpilih selanjutnya akan menjadi penggerak pendidikan di wilayahnya.

g) Wahana Edukasi Bima

Program ini memberikan edukasi kepada anak-anak dari wilayah terpencil Bima untuk dibawa ke Kota Bima selama beberapa hari. Mereka diperkenalkan dengan berbagai hal, seperti membuat surat, membaca di perpustakaan, melihat bandara dan pesawat, dan melihat istana, dalam rangka meningkatkan wawasan mereka.

h) ProDEP

Program ini adalah program pengembangan keprofesian tenaga kependidikan yang merupakan bagian dari Program Kemitraan Australia dengan Indonesia (AEPI) untuk memperbaiki/meningkatkan mutu kepemimpinan dan pengelolaan sekolah dan madrasah.

Empat inovasi/program/kebijakan lainnya yang tidak terkait langsung dengan pembelajaran murid adalah:

a) Kelas Inspirasi

Program ini menghadirkan cerita sukses orang-orang dari berbagai profesi ke sekolah dan masyarakat umum agar mereka mendapatkan gambaran yang lebih luas akan cita-cita mereka pada masa depan.

b) Membumikan Alquran

Program ini merupakan bagian dari pendidikan karakter yang digagas bupati, yaitu berupa kegiatan membaca Alquran selama 15 menit sebelum pelajaran pertama.

c) Salat berjemaah di sekolah

Program ini merupakan bagian dari pendidikan karakter yang digagas oleh bupati. Melalui program ini, guru dan murid diminta melaksanakan salat Zuhur berjemaah di sekolah.

d) Larangan merokok di lingkungan sekolah

Larangan ini merupakan gagasan bupati untuk menjaga kesehatan dan menegakkan disiplin guru dan murid.

Semua inovasi tersebut diharapkan berdampak positif pada kondisi pendidikan daerah. Menurut para informan dan peserta FGD tingkat kabupaten, hampir semua inovasi tersebut belum menunjukkan dampaknya karena belum lama dilaksanakan atau karena jangkauan sasaran wilayah/sekolahnya terbatas. Namun, menurut informan, ada beberapa inovasi yang mendapat apresiasi baik, yaitu RUBI, Bima Mengajar, Kelas Inspirasi, dan Wahana Edukasi Bima. Inovasi yang digagas atau merupakan replikasi dari kegiatan Indonesia Mengajar tersebut dinilai memberikan inspirasi atau pembelajaran yang positif, terutama bagi para guru.

Di satu SD yang dikunjungi, ada juga inovasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu pemberian pelajaran tambahan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan berhitung murid kelas 1–3. Di sekolah tersebut, dibentuk tim calistung yang terdiri atas enam guru. Murid yang dibimbing hanya murid yang kemampuan membaca dan berhitungnya masih kurang. Melalui kegiatan yang dilaksanakan pada semester genap dan setelah jam sekolah tersebut, kemampuan murid dalam membaca dan berhitung mengalami peningkatan. Kegiatan ini merupakan inisiatif kepala sekolah SD tersebut. Di kecamatan lain, kepala UPTD juga mengaku bahwa dia memberikan saran kepada sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya untuk memberikan bimbingan tambahan kepada murid kelas 1–3 SD yang belum lancar membaca dan berhitung. Namun, di SD yang dikunjungi yang berada di wilayah kerjanya, tidak diperoleh informasi tentang kegiatan tersebut.

## IV. PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBELAJARAN: KETERTARIKAN DAN PENGARUH

Bidang pendidikan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari latar belakang kelembagaan yang berbeda. Berdasarkan hasil FGD pemangku kepentingan tingkat kabupaten, ada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah atau membuat keputusan dan ada juga yang tidak. Tingkat ketertarikan dan pengaruh lembaga terhadap bidang pendidikan juga berbeda. Di antara lembaga-lembaga tersebut terbentuk hubungan atau jejaring komunikasi yang sifatnya formal dan informal.

### 4.1 Pemangku Kepentingan yang Berwenang Menyelesaikan Masalah

Rendahnya kualitas hasil pembelajaran pendidikan dasar merupakan masalah yang harus segera ditangani. Jika dibiarkan berlarut-larut, kualitas hasil pembelajaran dikhawatirkan akan makin menurun. Terdapat empat lembaga utama di Kabupaten Bima yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah terkait kualitas hasil pembelajaran, yakni bupati, Dinas Dikpora, DPRD, dan kepala sekolah.

- a) Bupati merupakan tokoh sentral yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan. Bupati mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan masalah karena merupakan pimpinan sebuah daerah otonom; memiliki dukungan SDM, khususnya di bidang pendidikan; dan memiliki otoritas dalam penempatan guru melalui BKD.
- b) Dinas Dikpora merupakan lembaga pelaksana kebijakan bupati dan memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi lembaga pendidikan. Lembaga ini sudah dibekali regulasi daerah terkait penyelenggaraan pendidikan dan sudah mempunyai sistem pelaporan, pengawasan, dan evaluasi berkala.
- c) DPRD merupakan lembaga sentral karena mempunyai kewenangan pada aspek regulasi, pengawasan, dan penganggaran di daerah. Lembaga ini memiliki kontrol terhadap masyarakat sipil dan bisa mendapat input dari berbagai pihak.
- d) Kepala sekolah merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan masalah di tingkat sekolah. Kepala sekolah dapat mengatur dan mengawasi guru serta proses belajar-mengajar dengan tetap berpatokan pada regulasi/kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi.

Agar semua pihak berwenang tersebut mampu melakukan upaya penyelesaian masalah, diperlukan dukungan dari berbagai unsur, termasuk dukungan antarlembaga berwenang itu sendiri. Secara umum, dukungan yang dibutuhkan adalah komitmen kepala daerah, komitmen DPRD, dan komitmen partai dalam menyelesaikan masalah serta memajukan pendidikan. Khusus untuk kepala sekolah, dibutuhkan komitmen dan dukungan dari lembaga atasan, guru, dan orang tua murid.

Untuk meningkatkan kapasitas lembaga berwenang tersebut, dibutuhkan dukungan berupa, antara lain, basis data pendidikan yang valid dan terbaru, hasil kajian dan pertimbangan ahli, ketersediaan anggaran, penerapan mekanisme kontrol yang ketat, dan peningkatan kualitas SDM. Selain itu, pihak berwenang juga membutuhkan dukungan dari dunia usaha melalui pengembangan program

*corporate social responsibility* (CSR) dan penghilangan pengaruh sosial-politik dalam penyelenggaraan pendidikan (lihat Lampiran 9).

## 4.2 Ketertarikan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan

Selain pemangku kepentingan yang mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan atau perubahan di bidang pendidikan dasar, terdapat berbagai pemangku kepentingan lain yang juga memiliki ketertarikan atau pengaruh (lihat Lampiran 5). Tingkat ketertarikan dan pengaruh tiap pemangku kepentingan tersebut berbeda-beda; hal ini dipengaruhi oleh, antara lain, tupoksinya masing-masing.

Pada kelompok yang memiliki ketertarikan dan pengaruh yang tinggi, terdapat bupati, Dinas Dikpora, dan sekolah (kepala sekolah dan guru). Bupati mempunyai ketertarikan dan pengaruh paling tinggi pada pembelajaran pendidikan dasar karena merupakan lembaga yang paling berwenang di tingkat kabupaten dan mempunyai visi dan misi di bidang pendidikan yang tertuang dalam RPJMD. Dinas Dikpora mempunyai ketertarikan dan pengaruh yang tinggi, tetapi pengaruhnya di bawah bupati karena merupakan lembaga pelaksana kebijakan pemda/bupati dan mempunyai tupoksi di bidang pendidikan. Sekolah mempunyai ketertarikan yang tinggi, tetapi pengaruhnya di bawah bupati dan Dinas Dikpora karena tupoksinya hanya untuk lingkup sekolah.

Lembaga yang mempunyai pengaruh tinggi, tetapi ketertarikan rendah, adalah DPRD dan Bappeda. DPRD mempunyai pengaruh besar karena merupakan lembaga yang berwenang dalam membuat/menetapkan kebijakan dan anggaran. Ketertarikannya pada bidang pendidikan masih rendah karena selama ini DPRD hanya sebatas membahas anggaran dan program yang diajukan Dinas Dikpora tanpa mengetahui proses, capaian, dan dampaknya. Bappeda mempunyai pengaruh cukup tinggi karena lembaga ini menangani perencanaan tingkat kabupaten, tetapi merupakan lembaga di bawah komando bupati. Ketertarikan Bappeda rendah karena tupoksi lembaga ini bersifat umum untuk semua bidang.

Lembaga yang berada pada kelompok yang memiliki ketertarikan tinggi, tetapi pengaruhnya rendah, cukup banyak, yaitu Dewan Pendidikan, komite sekolah, pengawas sekolah, UPTD yang merupakan kepanjangan tangan Dinas Dikpora di tingkat kecamatan, organisasi profesi guru seperti PGRI, dan yayasan yang memiliki lembaga pendidikan. Semua lembaga tersebut dinilai mempunyai ketertarikan tinggi karena ruang lingkup kerjanya ada di bidang pendidikan, tetapi pengaruhnya pada kebijakan relatif kecil karena tupoksinya cenderung berada pada pelaporan terkait hasil pengawasan dan pemberian masukan.

Pada kelompok lembaga dengan ketertarikan dan pengaruh rendah terdapat ornop, media, pemerintah desa, dan dunia usaha. Ornop memiliki ketertarikan dan pengaruh agak tinggi di kelompok tersebut karena terdapat ornop yang bergerak di bidang pendidikan. Sementara itu, media, pemerintah desa, dan dunia usaha mempunyai ketertarikan dan pengaruh paling rendah karena lembaga-lembaga tersebut tidak berkecimpung langsung dalam dunia pendidikan; walaupun ada keterkaitan, sifatnya hanya sampingan atau insidental.

Terlepas dari tinggi atau rendahnya pengaruh, hampir semua informan penelitian ini tertarik untuk terlibat dalam kegiatan inovasi pendidikan dasar di Kabupaten Bima. Mereka bersedia dilibatkan, baik terkait lembaganya yang mempunyai tupoksi di bidang pendidikan maupun secara individu. Mereka juga menyatakan mempunyai pengaruh terhadap bidang pendidikan, khususnya pembelajaran. Berikut adalah pengaruh informan berdasarkan kelompok lembaga.

- a) Bappeda: mengoordinasikan dan memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan, serta terlibat dalam pembuatan regulasi daerah terkait pendidikan.
- b) DPRD: menetapkan porsi anggaran pendidikan dan melakukan kontrol.
- c) Dinas Dikpora: membuat perencanaan program pendidikan, melaksanakan program pendidikan, mengatur penyelenggaraan pendidikan, dan mendampingi pengawas serta UPTD.
- d) Sekda: melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan bupati.
- e) Dewan Pendidikan: melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada bupati dan Dinas Dikpora, serta meningkatkan kapasitas komite sekolah.
- f) PGRI: memfasilitasi, mengadvokasi, dan meningkatkan kualitas guru, serta memberi masukan kepada Dinas Dikpora.
- g) Ornop: ada yang mempunyai perhatian khusus pada bidang pendidikan, terlibat dalam pembuatan regulasi pendidikan daerah, dan beberapa kali mendampingi Bappeda pada saat ada tamu terkait pendidikan.
- h) Media: meliput dan memberitakan permasalahan terkait pendidikan.
- i) UPTD: mengendalikan mutu pendidikan dasar dan melakukan koordinasi dengan sekolah dan pengawas sekolah di wilayah kerjanya.
- j) Pengawas sekolah: melakukan evaluasi akademik dan manajerial sekolah, serta meningkatkan kualitas guru melalui kegiatan MGMP.
- k) Komite sekolah: melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan sekolah.
- l) Kepala sekolah: mengatur urusan manajerial sekolah, memotivasi murid, memotivasi guru, dan meningkatkan kedisiplinan serta kualitas guru.
- m) Kepala desa: mendorong orang tua untuk menyekolahkan dan memperhatikan anaknya.

### 4.3 Jejaring Pemangku Kepentingan

Di antara berbagai pemangku kepentingan pendidikan dasar terbangun hubungan atau jejaring komunikasi dalam bentuk pelaporan, pengawasan/kontrol, perintah/komando, koordinasi, dan pemberian masukan. Pelaporan cenderung dilakukan oleh lembaga bawahan kepada atasan, seperti sekolah kepada UPTD dan pengawas; UPTD dan pengawas kepada Dinas Dikpora; dan Dinas Dikpora kepada bupati. Dinas Dikpora juga menyerahkan laporan kepada Bappeda dan DPRD sebagai salah satu pelaksanaan fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap program atau kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Dikpora. Dalam beberapa hal, sekolah juga menyampaikan laporan kepada komite sekolah, meskipun hanya secara lisan.

Sebaliknya, pengawasan/kontrol dilakukan oleh lembaga yang lebih tinggi kepada lembaga di bawahnya, seperti bupati kepada Bappeda dan Dinas dikpora; Dinas Dikpora kepada pengawas sekolah, UPTD, dan sekolah; serta pengawas sekolah dan UPTD kepada sekolah. Di dalam sekolah, fungsi kontrol dilakukan oleh kepala sekolah kepada para guru.

Koordinasi dilakukan oleh lembaga yang tidak berada pada struktur organisasi yang sama, seperti bupati dengan DPRD; Bappeda dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah, termasuk Dinas Dikpora; serta Dewan Pendidikan dan organisasi guru dengan Dinas Dikpora. Dewan Pendidikan dan organisasi guru juga memberi masukan kepada Dinas Dikpora dan bupati. Grafik jejaring komunikasi antarpemangku kepentingan pendidikan dasar dapat dilihat pada Lampiran 6.

## LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

### Sepuluh Isu Utama Berdasarkan Kelompok Pemangku Kepentingan

Isu terkait pendidikan dasar yang disampaikan informan cukup banyak dan beragam. Isu yang disampaikan informan berbeda-beda karena sifat pertanyaan ini sangat terbuka. Informan dibiarkan mengemukakan isu yang mereka ketahui dan ingat saat wawancara dilakukan. Pertanyaannya terbuka menyebabkan suatu isu yang tidak dikemukakan oleh seorang informan bisa jadi bukan karena informan tersebut tidak menganggap penting isu tersebut tetapi karena lupa atau tidak terpikirkan saat wawancara. Pada studi ini, isu yang disampaikan oleh para informan pada masing-masing kelompok pemangku kepentingan diurutkan berdasarkan frekuensi penyebutan oleh informan. Sepuluh isu teratas dijadikan sebagai isu utama pada tiap kelompok pemangku kepentingan.

#### a) Kelompok Pembuat Kebijakan

Lembaga yang termasuk pembuat kebijakan terdiri atas empat lembaga, yaitu Dinas Dikpora, Bappeda, DPRD, dan sekda. Jika dilihat berdasarkan lembaganya, Dinas Dikpora merupakan lembaga yang paling banyak mengemukakan isu dan hampir semua isu yang dikemukakan oleh informan lain juga dikemukakan oleh Dinas Dikpora. Hal ini bisa dipahami karena Dinas Dikpora merupakan lembaga terdepan dalam bidang pendidikan sehingga mempunyai tingkat pemahaman akan isu pendidikan yang lebih mendalam. Sepuluh isu utama yang dikemukakan kelompok pembuat kebijakan tersebut meliputi:

- (1) Kualitas guru atau ketersediaan guru berkualitas yang masih rendah dinilai oleh semua lembaga di kelompok pembuat kebijakan sebagai salah satu masalah utama dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Bima. Rendahnya kualitas tersebut terjadi pada guru yang berstatus PNS dan non-PNS atau sukarela. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kualitas guru rendah, yaitu latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai, terbatasnya pelatihan, dan banyaknya perguruan tinggi lokal dengan spesifikasi pendidikan guru yang menghasilkan ribuan lulusan per tahun.
- (2) Distribusi guru yang tidak merata merupakan masalah pendidikan yang disampaikan oleh informan dari tiga lembaga pembuat kebijakan. Guru-guru PNS biasanya minta ditempatkan di wilayah perkotaan atau di wilayah yang mudah diakses. Sementara itu, penempatan guru sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Akibatnya, guru-guru PNS cenderung menumpuk di wilayah perkotaan, sedangkan di wilayah perdesaan, apalagi wilayah terpencil, jumlahnya cenderung terbatas.
- (3) Dukungan anggaran bagi penyelenggaraan pendidikan masih terbatas dan perencanaannya kurang matang. Hal ini dikemukakan oleh informan dari tiga lembaga pembuat kebijakan. APBD yang disediakan untuk pendidikan, selain gaji pegawai, hanya mencapai 2,4%. Kondisi tersebut membuat berbagai aktivitas peningkatan mutu pembelajaran tidak dapat dibiayai. Lebih dari itu, perencanaan penggunaan anggaran juga dinilai kurang matang yang menyebabkan tidak meratanya penyebaran program/bantuan antarsekolah. Ada sekolah yang sering atau banyak menerima program/bantuan dan sebaliknya ada sekolah yang jarang atau sedikit menerima program/bantuan.
- (4) Kuatnya pengaruh politik disampaikan oleh informan dari tiga lembaga pembuat kebijakan. Dominasi faktor politik dalam penyelenggaraan pendidikan dianggap sebagai masalah yang signifikan karena menjadi faktor penentu dalam pengangkatan dan penempatan pegawai di berbagai jabatan di tingkat kabupaten hingga guru di sekolah, termasuk di dalamnya kebijakan mutasi dan rotasi. Kuatnya pengaruh politik, dalam hal ini kedekatan atau dukungan terhadap

bupati terpilih, menyebabkan orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas atau latar belakang di bidang pendidikan bisa menempati posisi-posisi cukup penting. Pada saat FGD kabupaten terungkap bahwa dua posisi penting di Dinas Dikpora kabupaten, yaitu kepala dinas dan sekretaris Dinas Dikpora, ditempati oleh pejabat dengan latar belakang hukum dan manajemen. Akibat kentalnya pengaruh politik, masing-masing posisi tidak dapat berperan secara maksimal. Aspek politik juga menjadi faktor yang menentukan dukungan infrastruktur sehingga terjadi ketidakmerataan pembagian bantuan.

- (5) Kurangnya dukungan infrastruktur pendukung pendidikan dasar disampaikan oleh informan dari tiga lembaga pembuat kebijakan. Ketersediaan alat bantu pelajaran, seperti buku penunjang bagi guru, alat peraga, laboratorium, pengelolaan laboratorium, dan lainnya, masih sangat kurang. Perpustakaan rata-rata belum berfungsi secara maksimal terutama karena bahan bacaannya sangat terbatas atau tidak tersedia. Bahkan, ada juga sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan. Hal ini menyebabkan murid tidak dapat mengembangkan kemampuan literasi dan numerasinya. Selain itu, wawasan mereka pun menjadi terbatas.
- (6) Motivasi dan profesionalisme guru untuk meningkatkan hasil pembelajaran masih rendah. Isu ini dikemukakan oleh informan dari tiga lembaga pembuat kebijakan. Adanya sertifikasi guru yang telah meningkatkan pendapatan guru menjadi hampir dua kali lipat tidak berbanding lurus dengan kenaikan motivasi atau profesionalisme guru. Bahkan, pada FGD kabupaten ada yang menyampaikan bahwa sertifikasi guru bersifat kontraproduktif. Guru, khususnya guru PNS, dinilai malas dan cenderung memanfaatkan guru sukarela untuk mengisi jam pelajaran mereka.
- (7) Akses terhadap pendidikan di daerah terpencil dinilai masih terbatas oleh informan dari dua lembaga pembuat kebijakan. Sekolah tingkat menengah (SMP) biasanya tersedia di ibu kota kecamatan, sementara sekolah tingkat dasar (SD) sudah tersedia di semua desa, tetapi ada dusun-dusun yang lokasinya cukup jauh dari sekolah dan aksesnya sulit. Hal tersebut menyebabkan murid harus menempuh jarak/menggunakan waktu yang cukup jauh/lama sehingga saat sampai di sekolah kondisi mereka lelah dan hal ini berpengaruh pada kualitas hasil pembelajaran.
- (8) Jumlah guru PNS untuk tingkat pendidikan dasar dinyatakan kurang oleh informan dari dua lembaga pembuat kebijakan. Kekurangan guru PNS tersebut terutama terjadi di daerah terpencil/pinggiran. Kondisi tersebut menyebabkan sekolah merekrut banyak guru sukarela. Guru-guru sukarela tersebut secara akademis sudah memenuhi persyaratan karena umumnya berpendidikan sarjana, tetapi kemampuan mereka masih di bawah standar. Guru-guru sukarela tersebut tidak mampu meningkatkan kemampuan karena penghasilan mereka dari mengajar sangat kecil; untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja di luar sekolah.
- (9) Minat baca murid masih rendah. Isu yang dikemukakan oleh informan dari dua lembaga pembuat kebijakan ini menyebabkan wawasan murid terbatas dan kemampuan literasi serta kualitas hasil pembelajaran mereka rendah. Rendahnya minat baca ini dipengaruhi, antara lain, oleh keterbatasan buku bacaan atau perpustakaan.
- (10) Perhatian orang tua yang masih rendah disampaikan oleh informan dari satu lembaga pembuat kebijakan. Tingkat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya sudah tinggi, tetapi orang tua yang memperhatikan pembelajaran anak saat di rumah sangat sedikit. Kepedulian orang tua untuk membimbing anaknya sangat rendah. Mereka seolah-olah menganggap bahwa murid adalah tanggung jawab sekolah. Sebagian orang tua yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani juga sering mengajak anaknya untuk membantu mereka bekerja saat musim panen atau tanam meskipun anak mereka harus membolos.

Untuk memecahkan berbagai isu tersebut, kelompok pembuat kebijakan membutuhkan informasi tentang

- (1) anggaran dan usulan program yang disetujui bupati dan DPRD,
- (2) ketersediaan pembiayaan di Dinas Dikpora,
- (3) ketersediaan dukungan dari Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi terhadap kegiatan pembelajaran,
- (4) program-program prioritas Pemerintah Pusat yang akan masuk ke daerah,
- (5) data mengenai kondisi pendidikan dan capaiannya,
- (6) sasaran program, dan
- (7) kondisi pendidikan riil.

#### **b) Kelompok Pelaksana Kebijakan**

Pelaksana kebijakan pendidikan terdiri atas 14 lembaga/kelompok guru, yaitu 2 UPTD, 4 pengawas, 4 kepala sekolah, dan 4 kelompok guru. Sepuluh isu utama yang dikemukakan kelompok pelaksana ini meliputi:

- (1) Dukungan orang tua rendah. Hampir semua informan yang tergabung dalam kelompok pelaksana kegiatan ini menyatakan bahwa dukungan orang tua terhadap pendidikan anaknya masih rendah. Masih banyak orang tua yang menyerahkan 100% pendidikan anaknya kepada sekolah. Mereka kurang menuntut anaknya untuk belajar kembali di rumah dan tidak mendampingi anaknya saat belajar di rumah. Kondisi tersebut terjadi terutama karena sebagian besar orang tua hanya berpendidikan rendah, yakni tidak tamat SD. Rendahnya pendidikan orang tua tersebut berpengaruh pada kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak dan kemampuannya dalam membimbing anaknya belajar. Orang tua yang mempunyai kesadaran tinggi dalam membimbing anak untuk belajar biasanya adalah orang tua yang menjadi pegawai yang notabene mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (2) Perlengkapan sekolah masih minim. Isu ini disampaikan oleh informan dari sepuluh lembaga/kelompok guru. Perlengkapan yang dinilai minim meliputi berbagai fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar, seperti buku pegangan murid dan buku pegangan guru. Buku pegangan murid masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Buku pegangan yang disediakan sekolah dari dana BOS biasanya tidak cukup untuk semua murid sehingga satu buku digunakan bersama atau secara bergantian oleh 2–5 murid. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa kondisi tersebut terjadi karena dana BOS tidak hanya digunakan untuk membeli buku pegangan murid dan biasanya baru dapat dicairkan sekitar tiga bulan sejak dimulainya tahun ajaran sehingga selama periode waktu tersebut para murid menggunakan buku tahun sebelumnya yang jumlahnya biasanya sudah berkurang karena rusak atau hilang. Buku pegangan untuk guru juga dinilai kurang sehingga tidak mendukung pengembangan pengetahuan guru. Perlengkapan lain yang juga dinilai kurang adalah alat peraga, alat olah raga, perlengkapan laboratorium, dan buku perpustakaan. Beberapa informan juga menyampaikan bahwa ketersediaan perlengkapan sekolah tidak merata antarsekolah. Hal ini bisa dilihat dari isu yang disampaikan. Ada sekolah yang menyampaikan bahwa dua LCD dan laptop yang mereka dapatkan masih kurang, padahal sekolah-sekolah lain belum mendapatkan bantuan tersebut sama sekali.
- (3) Orang tua mengikutsertakan anak dalam kegiatan usaha. Isu yang dikemukakan oleh sembilan lembaga/kelompok guru ini terkait juga dengan rendahnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak. Orang tua yang biasa melibatkan anak dalam kegiatan usaha mempunyai

mata pencaharian sebagai petani atau nelayan. Selain akibat tingkat pendidikan orang tua yang masih rendah, pelibatan anak dalam kegiatan usaha tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga—orang tua membutuhkan tenaga kerja tambahan tetapi tidak sanggup membayar upah buruh. Pada usaha pertanian, orang tua biasanya melibatkan anak saat musim tanam dan panen. Bagi orang tua yang mempunyai lahan usaha di luar kabupaten (cukup banyak orang dari Kabupaten Bima yang bertani di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa), mereka biasa membawa serta anak mereka sampai sehari-hari, bahkan lebih dari satu minggu. Anak yang baru duduk di tingkat awal SD pun terkadang dibawa karena alasan keamanan—tidak ada orang yang menjaga anak jika mereka ditinggal di rumah. Menghadapi hal demikian, pihak sekolah tidak bisa berbuat apa-apa karena pemberian sanksi bisa berakibat orang tua menjadi marah atau bahkan menarik anaknya untuk pindah atau berhenti sekolah, padahal sekolah masih berusaha untuk menambah jumlah murid.

- (4) Kemampuan atau kualitas guru masih rendah. Isu ini disampaikan sembilan lembaga, sementara tidak ada satu pun kelompok guru yang mengemukakannya. Rendahnya kemampuan guru disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya dukungan pelatihan, tidak sesuainya latar belakang pendidikan guru dengan kebutuhan pengajaran, rendahnya kualitas lembaga pendidikan, dan kurangnya dukungan buku pegangan. Faktor internal guru, seperti rendahnya kemauan untuk meningkatkan kompetensi, rendahnya komitmen atau semangat sebagai pengajar, dan rendahnya tingkat kecerdasan, juga berpengaruh. Beberapa penyebab tersebut sekaligus menjadi isu yang akan dijelaskan pada bahasan berikutnya.
- (5) Sarana dan prasarana sekolah kurang memadai. Isu ini dikemukakan oleh enam lembaga/kelompok guru terutama yang mengalami kekurangan sarana dan prasarana di sekolah atau wilayah kerjanya. Berbagai kekurangan sarana dan prasarana yang dikemukakan adalah kurangnya ruang kelas, kurangnya sarana sanitasi, tidak adanya ruang perpustakaan, tidak adanya ruang laboratorium, belum adanya ruang kepala sekolah, belum adanya ruang guru, atau sarana prasarana tersebut kurang memadai dan perlu renovasi.
- (6) Pelatihan guru kurang. Isu ini dikemukakan oleh enam lembaga/kelompok guru. Pelatihan yang disediakan oleh pemerintah melalui Dinas Dikpora kabupaten dinilai sangat terbatas. Padahal, pelatihan dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan guru yang bisa dibagikan dengan guru lain, terutama yang ada di sekolah yang sama. Keterbatasan pelatihan tersebut disampaikan oleh seorang kepala sekolah. Menurutnya, selama lima tahun ia bertugas, hanya dua guru di sekolahnya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan biasanya diberikan untuk guru PNS. Oleh karena itu, guru non-PNS bisa dikatakan tidak pernah mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi tingkat kabupaten ke atas. Mereka hanya mendapatkan pelatihan di lingkungan gugus atau wilayah melalui KKG dan MGMP yang frekuensi penyelenggaraannya juga sangat jarang. Pelatihan yang dibutuhkan guru-guru terutama adalah pelatihan untuk meningkatkan ilmu, teknik mengajar, dan penguasaan materi pelajaran.
- (7) Latar belakang pendidikan guru tidak sesuai. Isu ini dikemukakan oleh lima lembaga di luar kelompok guru dan terjadi pada guru PNS, honorer daerah, dan sukarela sekolah. Gambaran dari isu ini adalah, antara lain, kebutuhan akan guru SD dipenuhi oleh guru yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan sarjana PGSD dan kebutuhan akan guru mata pelajaran tertentu di SMP dipenuhi oleh guru dengan latar belakang mata pelajaran lain. Kondisi tersebut terjadi, antara lain, karena (i) pada sertifikasi guru sebelumnya, hanya ada persyaratan sarjana tanpa spesifikasi sarjana pendidikan sehingga guru-guru yang belum sarjana berusaha untuk meraih gelar sarjana hanya sebagai formalitas saja dengan kuliah di perguruan tinggi terdekat atau mudah dan murah untuk diakses; (ii) penempatan guru PNS atau honorer daerah oleh

lembaga di tingkat kabupaten cenderung tidak memperhatikan kebutuhan sekolah karena lebih dipengaruhi oleh kepentingan politis; dan (iii) dalam merekrut guru sukarela, sekolah kurang memperhatikan kebutuhan karena dipengaruhi oleh aspek sosial-politik, seperti adanya titipan dari lembaga lebih tinggi.

- (8) Jumlah guru tetap sangat sedikit. Isu ini dikemukakan oleh empat lembaga/kelompok guru. Kekurangan guru tetap atau guru PNS terjadi di hampir semua sekolah, tetapi jumlah kekurangannya bervariasi antarsekolah karena tidak meratanya penempatan guru. Di sekolah yang menjadi sekolah sampel, proporsi guru PNS dari jumlah guru keseluruhan berkisar 5%–60%. Ada sekolah yang memiliki sepuluh guru PNS, tetapi ada juga yang hanya memiliki satu guru PNS. Kebutuhan akan guru PNS tersebut hampir semuanya dipenuhi oleh guru sukarela yang direkrut oleh sekolah dan digaji seadanya dari dana BOS yang diperoleh. Beberapa sekolah juga mendapat guru honorer daerah, tetapi jumlahnya sangat sedikit; di sekolah sampel hanya ada satu guru honorer daerah.
- (9) Semangat belajar murid rendah. Isu ini dikemukakan oleh empat lembaga/kelompok guru. Semangat murid untuk belajar dinilai masih rendah di hampir semua sekolah. Murid tidak hanya malas belajar, tetapi mereka bahkan sering membolos. Hal ini dipengaruhi, antara lain, oleh kurangnya dukungan dari orang tua dan ketidaktahuan akan masa depan. Contoh anggota masyarakat yang berhasil menjadi sarjana pun kurang dapat memotivasi murid untuk giat belajar karena fakta di lingkungan mereka menunjukkan bahwa sarjana tersebut sulit mendapatkan pekerjaan sehingga hanya bisa menjadi guru sukarela dan bertani. Anak-anak yang malas belajar dan sering membolos biasanya mempunyai prestasi akademik yang rendah. Menghadapi masalah ini, ada sekolah yang memanggil orang tua ke sekolah. Jika kurang ditanggapi, guru-guru melakukan pendekatan langsung kepada murid dan orang tua dengan mendatangi rumah mereka. Pada kasus murid membolos saat musim panen atau melaut, sekolah mengalami kesulitan yang lebih besar.
- (10) Minat murid untuk menonton tayangan televisi tinggi. Isu ini dikemukakan oleh tiga lembaga/kelompok guru. Menonton televisi masih merupakan kegiatan yang sangat diminati para murid di hampir semua sekolah yang dikunjungi. Para murid cenderung menghabiskan waktu di rumahnya untuk menonton tayangan televisi daripada belajar. Di dua sekolah yang didatangi, terdapat kemungkinan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh ketersediaan tayangan televisi yang belum lama ini bisa mereka nikmati dengan leluasa karena di kedua wilayah tersebut listrik baru tersedia sekitar dua tahun lalu. Selain mengganggu waktu belajar, beberapa tayangan televisi juga dinilai berpengaruh negatif karena murid mencontoh beberapa gerakan atau perkelahian yang ditayangkan.

Untuk memecahkan berbagai isu tersebut, kelompok pelaksana kegiatan membutuhkan informasi tentang

- (1) keberadaan program pendidikan,
- (2) ketersediaan kebijakan bantuan sarana dan prasarana,
- (3) ketersediaan pelatihan untuk guru-guru,
- (4) metode untuk mengatasi anak yang malas sekolah, dan
- (5) sarana komunikasi yang efektif.

### c) Kelompok Pendukung Kebijakan

Kelompok pendukung kebijakan pendidikan terdiri atas informan dari 14 lembaga dan kelompok orang tua, yaitu Dewan Pendidikan, PGRI, LSM, media lokal, 4 komite sekolah, 2 kepala desa, dan 4 kelompok orang tua. Sepuluh isu utama yang dikemukakan kelompok pendukung ini meliputi:

- (1) Kualitas guru rendah. Isu ini dikemukakan oleh informan dari delapan lembaga. Rendahnya kualitas guru disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (i) ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diajar; (ii) pelatihan sangat kurang; dan (iii) mekanisme mutasi, penempatan, dan peningkatan jabatan guru lebih dipengaruhi alasan politis daripada prestasi. Khusus untuk guru sukarela yang banyak digunakan sekolah, kesejahteraannya masih kurang sehingga tidak mampu meningkatkan kualitasnya, apalagi insentif mengajarnya juga hanya dibayar sekadarnya, yakni berkisar Rp300.000–Rp475.000 per tiga bulan. Sementara itu, adanya tunjangan sertifikasi guru dan guru terpencil bagi guru tetap atau PNS juga tidak berbanding lurus dengan kualitas pengajaran. Khusus untuk kelompok orang tua, tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa kualitas guru rendah. Namun, ada orang tua yang mengeluhkan cara mengajar guru yang cenderung hanya menulis di papan tulis tanpa memberi penjelasan, mengharapkan guru lebih memotivasi murid untuk belajar di rumah dengan alasan murid lebih menurut kepada guru, dan mengharapkan guru banyak memberi PR supaya murid terdorong untuk belajar di rumah.
- (2) Perhatian orang tua pada pendidikan anak rendah. Isu ini dikemukakan oleh informan dari lima lembaga dan empat kelompok orang tua. Rendahnya perhatian orang tua berupa, antara lain, (i) pemberian pemahaman kepada anak akan pentingnya pendidikan masih minim; (ii) tidak pernah menanyakan masalah sekolah dan pembelajaran kepada anak; (iii) membiarkan anak membolos; (iv) mengajak anak untuk membantu kegiatan menanam atau memanen sehingga anak membolos; dan (v) menganggap bahwa sekolah merupakan satu-satunya lembaga yang berkewajiban untuk memberikan pembelajaran kepada anak sehingga orang tua tidak memberi bimbingan lagi di rumah. Rendahnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi keluarga yang lemah dan tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Empat kelompok orang tua juga mengakui bahwa perhatian sebagian besar orang tua terhadap pendidikan anak masih kurang. Satu kelompok orang tua menyatakan bahwa orang tua tidak mengetahui kondisi anaknya di sekolah dan tidak memberikan bimbingan di rumah karena mereka sibuk bekerja atau tidak paham dengan pelajarannya.
- (3) Tanggung jawab guru sebagai pendidik masih rendah. Isu ini dikemukakan oleh informan dari lima lembaga. Penjelasan dari isu ini adalah bahwa (i) sebagian guru tidak memiliki gairah untuk mencerdaskan anak didiknya; (ii) guru hanya sekadar menjalankan kewajiban mengajar sesuai jam mengajar tanpa peduli apakah anak didiknya dapat menyerap pelajaran dengan baik atau tidak; (iii) guru-guru PNS menyerahkan tanggung jawab mengajarnya kepada guru sukarela yang mendampinginya, padahal guru-guru sukarela sering meninggalkan sekolah saat musim tanam dan panen untuk mencari tambahan penghasilan. Terkait isu ini, kelompok orang tua tidak menyatakan hal tersebut, tetapi mereka mengharapkan dukungan dari guru agar anak-anaknya lebih giat belajar, khususnya di rumah, dan guru lebih banyak lagi menjelaskan pelajaran supaya murid lebih paham akan materi pelajarannya.
- (4) Anak dilibatkan dalam pekerjaan orang tua. Isu ini dikemukakan oleh informan dari empat lembaga dan dua kelompok orang tua. Penjelasan mirip dengan penjelasan pada kelompok pelaksana kebijakan bahwa orang tua biasa melibatkan anaknya dalam pekerjaannya meskipun anak harus membolos. Orang tua yang demikian biasanya para nelayan dan petani. Orang tua yang bekerja sebagai nelayan kadang-kadang membawa anaknya melaut sampai berhari-hari pada musim penangkapan ikan. Orang tua yang bekerja sebagai petani biasa

melibatkan anaknya pada saat musim tanam dan panen. Pada dua musim tersebut, mereka membutuhkan bantuan tenaga kerja karena mereka tidak sanggup bekerja sendiri. Namun, karena mereka tidak mampu mengupah pekerja, mereka akhirnya mempekerjakan anak mereka sendiri. Saat musim tanam dan panen tersebut, anak membolos setidaknya selama dua hari.

- (5) Minat baca murid rendah. Isu ini dikemukakan oleh informan dari empat lembaga dan satu kelompok orang tua. Rendahnya minat baca dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kurangnya dorongan orang tua kepada anak untuk membaca di rumah, orang tua jarang memberi contoh kebiasaan membaca, tingginya minat anak untuk menonton tayangan televisi, dan terbatasnya ketersediaan buku bacaan.
- (6) Buku bacaan kurang. Isu ini disampaikan oleh empat lembaga dan dua kelompok orang tua. Kondisi ini menyebabkan rendahnya minat baca dan kurang berkembangnya wawasan murid. Perpustakaan sekolah kurang menyediakan buku bacaan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Jumlah buku bacaan yang tersedia di perpustakaan biasanya terbatas dan sebagian besar merupakan buku-buku lama sehingga kurang menarik bagi para murid. Satu kelompok orang tua juga mengeluhkan adanya pembatasan akses murid terhadap perpustakaan sekolah, yakni hanya satu minggu sekali, dengan alasan pergiliran akses antarkelas. Kelompok tersebut juga mengeluhkan terbatasnya ketersediaan buku pendukung pembelajaran yang berkualitas di Kabupaten Bima dan Kota Bima. Orang tua yang mendukung anaknya terkadang membeli buku pendukung saat mendapat tugas ke luar daerah.
- (7) Pelatihan guru terbatas. Isu ini dikemukakan oleh informan dari empat lembaga. Guru-guru jarang mendapatkan pelatihan sehingga tidak bisa mengembangkan kemampuan mengajarnya. Selain itu, pelaksanaan pelatihan guru tidak merata dan ada kecenderungan bahwa pelatihan hanya diikuti guru tertentu yang dianggap pintar atau mempunyai kedekatan hubungan secara politis.
- (8) Pengaruh sosial-politik kuat. Isu ini dikemukakan oleh informan dari empat lembaga. Kuatnya pengaruh politik terjadi karena adanya otonomi daerah yang memberi kewenangan besar kepada daerah dalam menyusun kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Pengaruh politik dalam dunia pendidikan terjadi pada berbagai hal, seperti (i) penempatan pejabat Dinas Dikpora; (ii) mutasi dan penempatan pejabat posisi lainnya, termasuk kepala sekolah, guru, dan pengawas; (iii) peningkatan jabatan; dan (iv) penentuan penerima bantuan sarana dan prasarana, serta penentuan peserta pelatihan. Dalam penempatan dan kenaikan jabatan, aspek kualitas kurang diperhatikan sehingga berpengaruh pada kualitas dunia pendidikan. Misalnya, guru berkualitas tetap menjadi guru, sementara guru tidak berkualitas dapat menjadi kepala sekolah karena pengaruh kedekatan politik. Dalam pembangunan sarana dan prasarana sekolah, kedekatan politik menyebabkan ada sekolah yang setiap tahun mendapat bantuan, dan sebaliknya ada sekolah yang tidak mendapatkan bantuan meskipun kondisinya sangat membutuhkan. Kuatnya pengaruh politik tersebut telah menyebabkan para guru dan perangkat pendidikan sering kali terpaksa terlibat dalam kegiatan politik praktis, termasuk ketika pilkada dan pileg karena pemenang pilkada dan pileg biasanya akan mengakomodasi kepentingan pendukungnya dan bersikap sebaliknya kepada pihak yang tidak mendukung.
- (9) Distribusi guru PNS tidak merata. Isu ini dikemukakan oleh informan dari tiga lembaga. Distribusi guru PNS tidak merata terutama karena dipengaruhi aspek politik. Guru lebih banyak ditempatkan di sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah perkotaan, sementara jumlah guru di sekolah-sekolah di daerah terpencil atau pinggiran kurang. Bahkan, guru yang bertugas di

daerah terpencil sering kali kembali ke kota dan meninggalkan pekerjaannya karena alasan akses yang tidak mendukung.

- (10) Latar belakang pendidikan guru tidak sesuai. Isu ini dikemukakan oleh informan dari tiga lembaga. Guru yang mempunyai latar belakang pendidikan tertentu diminta untuk mengajar mata pelajaran yang bukan merupakan bidang ajarnya. Hal ini terjadi karena sekolah kekurangan guru dengan latar belakang yang sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memecahkan berbagai isu tersebut, kelompok pendukung kegiatan membutuhkan berbagai informasi tentang

- (1) ketersediaan anggaran yang bisa digunakan untuk melatih komite sekolah, melaksanakan rapat koordinasi berkala dengan komite sekolah, dan melakukan evaluasi kinerja;
- (2) data-data dari lembaga penelitian sebagai penunjang upaya pembuatan program, advokasi, dan gerakan lainnya;
- (3) permasalahan pendidikan dari masyarakat;
- (4) hasil kajian mendalam sebagai bahan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memutuskan kebijakan; dan
- (5) proses dan capaian berbagai kegiatan, seperti kerja sama yang dilakukan, kebijakan, dan implementasi kebijakan.

#### **d) Kelompok Murid**

Sesuai dengan pedoman pertanyaan, isu yang dikemukakan kelompok murid berkaitan dengan alasan bersekolah di sekolah bersangkutan, pelajaran yang disukai dan tidak disukai, cara belajar di sekolah, cara belajar di rumah, akses terhadap pelajaran tambahan, harapan terhadap kelanjutan pendidikan, dan perubahan yang terjadi di sekolah.

- (1) Alasan yang paling sering dikemukakan kelompok murid dalam memilih sekolah saat ini adalah (i) jarak sekolah dekat dengan rumah, (ii) banyak teman bermain yang bersekolah di sekolah tersebut, (iii) ada kakak atau saudara yang bersekolah di sekolah tersebut, dan (iv) disuruh oleh orang tua. Alasan lain yang dikemukakan sebagian kecil murid terkait dengan kondisi sekolahnya adalah bahwa sekolahnya berkualitas baik dan memiliki fasilitas yang lengkap. Secara umum, jarak yang dekat merupakan alasan yang paling banyak dikemukakan. Selain dapat mengirit ongkos dan sekolah dapat ditempuh dengan berjalan kaki, jarak yang dekat antara rumah dan sekolah merupakan nilai lebih karena mereka, khususnya murid SMP, bisa membantu orang tua dalam kegiatan usaha pertanian dan pekerjaan sehari-hari.
- (2) Pelajaran yang disukai murid beragam dan di hampir semua pelajaran, ada murid yang menganggapnya sebagai pelajaran yang paling disukai. Alasan menyukai pelajaran tertentu juga berbeda-beda, seperti pelajarannya mudah dimengerti, suka dengan materi pelajarannya, suka dengan cara guru menjelaskannya, serta gurunya baik karena tidak suka memukul atau menghukum.
- (3) Pelajaran yang paling tidak disukai juga beragam. Alasan yang dikemukakan murid adalah, antara lain, (i) pelajarannya susah dimengerti; (ii) gurunya galak, suka memukul, dan suka membentak; (iii) gurunya sering tidak hadir; (iv) gurunya hanya menulis di papan tulis tanpa menjelaskan; (v) gurunya memberi terlalu banyak kegiatan menulis dan tidak dibarengi dengan praktik, padahal pelajaran tersebut membutuhkannya; dan (vi) ada kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah.

- (4) Ada murid yang menganggap pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia sebagai pelajaran paling disukai dan paling tidak disukai. Di luar itu, para murid menganggap bahwa pelajaran Matematika bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari karena mereka menjadi bisa berhitung saat berbelanja atau jajan, bisa menghitung hasil panen pertanian milik orang tua dan saat penjualannya, serta membantu orang tua yang bekerja sebagai pedagang. Sementara itu, manfaat Bahasa Indonesia terutama adalah mereka menjadi bisa berkomunikasi dengan orang dari luar daerah karena sehari-hari mereka menggunakan bahasa daerah. Cara murid untuk meningkatkan kemampuan berhitung dan berbahasa Indonesia sifatnya umum, yaitu dengan belajar lebih giat. Di SD yang terletak di wilayah perkotaan, murid mencari contoh-contoh soal di internet.
- (5) Secara umum, murid menyukai guru yang baik dalam arti tidak mudah memukul atau membentak saat murid melakukan kesalahan. Ada juga murid yang suka dengan guru yang tegas dan disiplin supaya murid tidak lagi melakukan kesalahan, tetapi hukumannya tidak perlu berat seperti hanya berjongkok. Dari cerita para murid, kebiasaan menghukum secara fisik tampaknya menjadi kebiasaan sebagian besar guru. Jika murid melakukan kesalahan, guru sering menghukum dengan memukul, menjewer, menyuruh *push up* atau berjalan sambil jongkok. Guru juga sering membentak murid saat memberi pelajaran. Berkaitan dengan cara guru mengajar, umumnya murid menyukai guru-guru yang bisa menjelaskan pelajaran dengan baik sehingga bisa dipahami oleh para murid. Jika ada murid yang kurang paham, guru tersebut akan menjelaskannya kembali. Metode pengajaran yang disukai adalah guru lebih banyak memberi penjelasan dan diskusi serta memberi contoh dengan alat peraga. Namun, alat peraga di sekolah-sekolah masih sangat terbatas. Saat menjelaskan tentang komputer, misalnya, murid hanya diperlihatkan gambar komputer karena tidak tersedianya komputer di sekolah sehingga murid kurang dapat menangkap penjelasan guru. Beberapa murid juga menyatakan bahwa mereka lebih suka dengan guru yang memberi banyak PR supaya dapat memicu mereka untuk belajar di rumah. Kebanyakan murid tidak menyukai guru yang hanya menulis di papan tulis atau banyak memberi tugas mencatat tanpa memberi penjelasan. Murid-murid juga tidak suka dengan guru yang sering tidak hadir saat jam pelajaran. Pada saat guru tidak hadir, murid diberi tugas mencatat atau hanya bermain-main. Terungkap juga dari diskusi kelompok SD bahwa ada kelas yang guru kelasnya (PNS) sering tidak hadir karena sakit sehingga digantikan oleh guru pendamping (sukarela). Jika murid menghadapi kesulitan dalam pelajaran di sekolah, mereka pada umumnya bertanya kepada teman yang sudah mengerti. Sebagian besar murid akan bertanya kepada guru jika teman-temannya juga tidak mengerti, tetapi sebagian kecil murid lainnya lebih memilih diam saja karena tidak berani bertanya kepada guru. Ada kecenderungan bahwa murid dari sekolah perkotaan lebih aktif dan lebih berani untuk bertanya kepada guru.
- (6) Ada kelompok murid yang menyampaikan bahwa guru sukarela biasa tidak hadir di sekolah saat musim tanam dan panen. Ketidakhadiran mereka bisa berlangsung cukup lama hingga mencapai satu bulan. Pada musim tanam dan panen, para murid juga sering tidak hadir di sekolah selama beberapa hari karena membantu orang tua di ladang. Namun, ada juga murid yang membantu di luar jam sekolah jika letak ladang orang tua mereka tidak jauh dari rumah.
- (7) Sebagian besar murid hanya belajar di rumah ketika ada PR atau esok harinya akan ada ulangan. Di rumah, mereka lebih memilih menonton televisi atau bermain bersama teman. Sebagian besar murid mempunyai kebiasaan menonton televisi untuk jangka waktu lama dari mulai pulang sekolah dan bisa hingga malam. Belajar di rumah tanpa harus ada PR atau rencana ulangan hanya dilakukan oleh sedikit murid dan mereka cenderung murid dari sekolah yang terletak di wilayah perkotaan. Sebagian murid menyatakan bahwa orang tua mereka biasa menyuruh belajar. Murid yang malas biasanya akan pura-pura belajar saat orang tua ada di dekatnya dan akan kembali bermain saat orang tua keluar rumah. Hanya sebagian kecil

murid bertanya kepada orang tua atau kakak mereka ketika menghadapi kesulitan saat belajar di rumah. Murid-murid lain tidak bertanya kepada orang tua atau kakak mereka karena orang tua mereka sibuk atau tidak paham dengan pelajarannya, sementara kakak mereka tidak ada. Beberapa murid juga biasa bertanya kepada teman-teman mereka, tetapi beberapa murid lainnya tidak melakukan apa-apa.

- (8) Media komunikasi yang digunakan oleh murid pada umumnya adalah bertemu langsung. Hanya di satu SD dan di satu SMP, muridnya biasa menggunakan HP untuk berkomunikasi, terutama dengan sesama murid. Mereka biasa mengirim pesan singkat kepada teman. Bahkan, murid SD yang terletak di perkotaan bisa mengirim pesan singkat kepada gurunya untuk bertanya tentang pelajaran. Biaya pesan singkat di wilayah Bima tidak dirasakan berat karena setelah mengeluarkan biaya Rp350 untuk beberapa pesan singkat, mereka bisa mengirim ratusan pesan singkat berikutnya secara gratis. Biaya menelepon dengan HP juga relatif murah karena hanya membutuhkan biaya Rp1.000 per hari untuk menelepon sepuasnya ke sesama jaringan telepon seluler dan enam nomor dari jaringan telepon seluler lain.
- (9) Hanya murid-murid di satu SD yang terletak di perkotaan dan di satu SMP mempunyai akses terhadap pelajaran tambahan. Di wilayah tersebut, murid bisa mengikuti pelajaran tambahan berbayar dari guru sekolah atau pihak lain. Murid di sekolah lain belum bisa mengakses pelajaran tambahan karena fasilitasnya tidak tersedia. Pelajaran tambahan disediakan oleh sekolah, tetapi hanya untuk murid tingkat akhir yang akan menghadapi ujian akhir. Sebagian besar murid tidak tertarik dengan pelajaran tambahan dan lebih memilih untuk bermain.
- (10) Berkaitan dengan pendidikan selanjutnya, semua murid menyatakan berencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan, hampir semua murid sudah mempunyai pilihan sekolah yang akan dituju. Alasan pemilihan sekolah yang dituju adalah jarak yang relatif dekat, ada saudara atau kakak yang bersekolah di sekolah yang dituju, sekolahnya bagus, fasilitasnya lengkap (seperti ada kantin), dan disuruh orang tua. Sebagian besar murid tidak melakukan persiapan khusus terkait rencana mereka melanjutkan pendidikan. Tampaknya, penyebabnya adalah karena sekolah yang dituju umumnya tidak menerapkan tes khusus untuk calon muridnya; murid hanya perlu mendaftar.

## LAMPIRAN 2

### Metode Komunikasi Pemangku Kepentingan dan Umpan Balik

Pemangku kepentingan melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan lain dan lintas kelompok. Komunikasi yang dilakukan bisa berupa komunikasi yang sifatnya rutin dan ada pula yang tidak rutin yang cenderung dilakukan saat dibutuhkan saja. Secara umum, media komunikasi yang digunakan adalah forum pertemuan, pertemuan individu, telepon, pesan singkat, laporan, dan surat. Beberapa informan menggunakan media WhatsApp, Facebook, dan surat elektronik, tetapi pemanfaatan untuk komunikasi terkait pendidikan masih terbatas karena informan yang menggunakannya juga tidak banyak.

#### a) Kelompok Pembuat Kebijakan

Kelompok pembuat kebijakan melakukan komunikasi di antara mereka terkait koordinasi, penyampaian perintah, penyampaian laporan, penentuan kebijakan (termasuk penentuan anggaran), serta permintaan data dan informasi. Selain itu, kelompok pembuat kebijakan ini juga melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan dari kelompok lainnya, yaitu dari kelompok pelaksana kebijakan dan kelompok pendukung kebijakan. Metode komunikasi yang digunakan beragam, tetapi cenderung formal, yaitu berupa komunikasi langsung dalam bentuk pertemuan, penyampaian laporan tertulis, surat undangan untuk pertemuan, dan surat edaran. Selain itu, komunikasi informal biasa dilakukan melalui telepon, pesan singkat, dan WhatsApp. Waktu komunikasi yang paling banyak dan efektif dilakukan adalah sekitar menjelang akhir dan awal tahun karena merupakan masa penyampaian laporan dan penentuan anggaran program/kebijakan/kegiatan.

Sebagai lembaga sentral bidang pendidikan, Dinas Dikpora setiap tahun membuat laporan tahunan lembaga dan laporan kegiatan, seperti LAKIP, yang disampaikan kepada lembaga terkait, seperti bupati, Bappeda, dan pihak terkait lainnya, seperti DPRD. Selain itu, Dinas Dikpora juga setiap tahun membuat Renja dan Renstra yang merupakan rencana program/kebijakan/kegiatan bidang pendidikan. Semua rencana program/kebijakan/kegiatan akan disampaikan terlebih dahulu kepada bupati dan Bappeda serta meminta persetujuan DPRD khususnya terkait anggarannya. Dalam pelaksanaan program/kebijakan/kegiatan, Dinas Dikpora bisa melibatkan lembaga bawahannya, seperti UPTD, pengawas, dan sekolah. Penyampaian rencana program/kebijakan/kegiatan kepada lembaga bawahan dilakukan melalui pertemuan atau surat edaran. Dari lembaga bawahan, Dinas Dikpora juga menerima laporan, baik yang disampaikan secara rutin dalam bentuk laporan tertulis maupun secara lisan yang sifatnya lebih insidental. Komunikasi Dinas Dikpora dengan lembaga bawahan juga dilakukan melalui pertemuan rutin, seperti dengan pengawas yang berkantor di Dinas Dikpora setiap Selasa.

Bappeda setiap tahun menyelenggarakan musrenbang kabupaten yang merupakan forum musyawarah rencana pembangunan daerah. Forum ini membahas usulan berbagai dinas atau pemangku kepentingan tingkat kabupaten, termasuk Dinas Dikpora, sekda, dan DPRD. Hasil musrenbang tersebut selanjutnya diperkuat dengan hasil reses DPRD yang merupakan usulan masyarakat. Bappeda juga biasa melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan tingkat kabupaten jika ada kebutuhan tertentu, seperti ketika ada permasalahan yang perlu disampaikan.

DPRD dan Bappeda juga menjalankan fungsi kontrol terhadap program/kebijakan/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Dikpora. Komunikasi yang dilakukan berupa permintaan informasi atau data terkait pendidikan kepada Dinas Dikpora. Permintaan biasanya disampaikan secara tertulis melalui

surat atau bisa juga melalui telepon. Permintaan informasi dan data tersebut bisa juga dilakukan terkait penentuan anggaran.

Selain dari Dinas Dikpora, DPRD juga mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat yang bisa digunakan sebagai sumber informasi untuk menentukan program/kebijakan/kegiatan tertentu, khususnya terkait anggaran, dan melaksanakan fungsi kontrol. Pengumpulan informasi dan data dari masyarakat dilakukan melalui kegiatan *reses*, *hearing* atau audiensi, dan penyampaian melalui telepon, pesan singkat, atau surat.

## **b) Kelompok Pelaksana Kebijakan**

Pada kelompok pelaksana kebijakan, komunikasi dilakukan pada kelompok yang sama, yakni UPTD, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Mereka juga melakukan komunikasi dengan lembaga dari kelompok lain, yakni dengan Dinas Dikpora sebagai lembaga atasan. Kepala sekolah terkadang berkomunikasi dengan sekda dan BKD. Kepala sekolah dan guru juga berkomunikasi dengan komite sekolah dan orang tua. Media komunikasi yang digunakan berupa laporan, surat, telepon, pesan singkat, dan tatap muka baik dalam kelompok maupun perseorangan.

Di lingkup UPTD, komunikasi dengan pengawas sekolah tingkat dasar dilakukan dalam rangka koordinasi karena keduanya membawahi sekolah dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Pengawas sekolah mengawasi bidang akademik dan manajemen sekolah, sedangkan UPTD berfungsi sebagai pengendali mutu. Setiap bulan UPTD mengadakan pertemuan dengan mengundang para kepala sekolah SD. Pada acara tersebut, biasanya pengawas juga berperan sebagai pembicara. Komunikasi bisa juga dilakukan melalui surat undangan atau telepon. UPTD juga berkomunikasi dengan kepala sekolah dan guru terkait kegiatan peningkatan mutu dalam bentuk keikutsertaan sekolah dalam lomba-lomba yang dibiayai dengan dana BOS. UPTD mengoordinasi pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk mengumpulkan dananya yang diserahkan sekolah setiap ada pencairan dana BOS. Sementara itu, pengawas sekolah melakukan komunikasi dengan kepala sekolah dan guru melalui kunjungan lapangan atau melalui telepon dan pesan singkat. Di tingkat kabupaten, UPTD dan pengawas juga melakukan pertemuan rutin di Dinas Dikpora tiap bulan sekaligus untuk menyampaikan laporan kondisi sekolah, tingkat kehadiran guru, dan administrasi guru. Selain itu, UPTD dan pengawas sekolah juga datang ke Dinas Dikpora tiap minggu untuk menghadiri pertemuan atau berkomunikasi dengan individu tertentu.

Komunikasi semua pihak dengan lembaga di tingkat kabupaten biasanya lebih berupa pelaporan, permintaan/pemberian data, serta penyampaian permasalahan dan program/kebijakan/kegiatan. Sekolah tingkat SD menyampaikan laporan kondisi sekolah setiap bulan kepada UPTD, sedangkan sekolah tingkat SMP melapor langsung kepada Dinas Dikpora yang disampaikan melalui internet. Selanjutnya, UPTD merekap data yang kemudian disampaikan kepada Dinas Dikpora. Sekolah juga terkadang melayani permintaan data dari sekda dan BKD secara langsung kapan saja. Sebaliknya, ada juga sekolah yang kadang-kadang mendatangi lembaga di tingkat kabupaten tersebut untuk menyampaikan permasalahannya masing-masing secara tertulis atau lisan. Penyampaian secara langsung tersebut biasa dilakukan jika sebelumnya mereka kurang mendapat tanggapan dari Dinas Dikpora.

Ada juga pertemuan rutin antarkepala sekolah dan antarguru melalui forum kepala sekolah (K3S) dan forum guru (KKG untuk guru SD dan MGMP untuk guru SMP). Forum K3S dilaksanakan dalam pertemuan rutin bulanan yang bertujuan, antara lain, membahas rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), sedangkan forum KKG dan MGMP kurang aktif karena masalah waktu, anggaran, dan koordinasi.

Komunikasi sekolah dengan komite sekolah lebih banyak dilakukan secara informal karena komite sekolah sering datang ke sekolah; bahkan, sekolah menyediakan meja khusus untuk komite sekolah. Sementara itu, komunikasi sekolah dengan orang tua biasanya dilakukan melalui pertemuan yang biasa dilakukan pada awal tahun ajaran, pada saat pencairan dana BSM untuk orang tua dari murid penerima bantuan tersebut, dan menjelang ujian akhir untuk orang tua murid kelas akhir. Pada acara tersebut, komite sekolah juga terlibat. Di satu sekolah yang dikunjungi, guru-guru juga melakukan komunikasi dengan orang tua dari murid yang membolos selama beberapa hari tanpa pemberitahuan dalam bentuk kunjungan ke rumah. Guru-guru di satu sekolah lain biasa melakukan komunikasi melalui pesan singkat dengan murid yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Guru-guru tersebut juga biasa berkomunikasi melalui Facebook dengan sesama guru di sekolah tersebut, guru dalam satu gugus, atau kenalan guru lain meskipun belum membentuk grup khusus.

### **c) Kelompok Pendukung Kebijakan**

Komunikasi kelompok pendukung kebijakan cenderung dilakukan dengan lembaga di luar kelompok ini. Dewan Pendidikan biasa berkomunikasi dengan bupati, Dinas Dikpora, dan sekolah; komite sekolah dengan sekolah; dan LSM dengan Bappeda. Komunikasi tersebut biasanya dilakukan melalui laporan tertulis, kunjungan langsung, forum pertemuan, telepon, dan pesan singkat.

Dalam menjalankan tupoksinya untuk mendorong mutu pelayanan pendidikan, Dewan Pendidikan seharusnya aktif melakukan komunikasi dengan komite sekolah. Namun, kegiatan tersebut terhambat karena terbatasnya anggaran. Dewan Pendidikan biasa melakukan kunjungan ke sekolah rata-rata dua kali dalam setahun. Kunjungan tersebut merupakan salah satu bahan bagi Dewan Pendidikan untuk membuat laporan tertulis yang akan disampaikan kepada bupati dan Dinas Dikpora sebagai masukan. Komunikasi secara langsung atau melalui telepon dan pesan singkat juga biasa dilakukan dengan Dinas Dikpora, apalagi mengingat Dewan Pendidikan juga berkantor di Dinas Dikpora. Dewan Pendidikan juga menerima aduan masyarakat terkait mutu pelayanan pendidikan melalui surat resmi.

Seperti Dewan Pendidikan, PGRI juga biasa berkomunikasi dengan Dinas Dikpora untuk berkoordinasi dan menyampaikan masukan. Komunikasi dilakukan melalui pertemuan langsung, telepon, dan pesan singkat. Sebagai organisasi guru, PGRI juga berkoordinasi dengan guru, menerima aduan guru, dan menyuarakan kepentingan guru. PGRI melakukan rapat koordinasi pengurus organisasi setiap triwulan dan setiap tahun. Aspirasi guru disampaikan kepada Dinas Dikpora melalui pertemuan. Kadang-kadang, PGRI juga melakukan demonstrasi dalam rangka aksi solidaritas guru.

LSM YISA merupakan sebuah LSM yang bergerak terutama di bidang pendidikan. LSM ini biasa melakukan komunikasi dengan Bappeda dan pernah terlibat dalam pembuatan peraturan daerah tentang pendidikan. Komunikasi LSM ini dengan Bappeda dilakukan secara langsung melalui tatap muka, telepon, pesan singkat, atau WhatsApp. Kadang-kadang, LSM ini juga terlibat dalam pertemuan Bappeda dengan pihak ketiga untuk membahas persoalan pendidikan. LSM ini juga melakukan komunikasi dengan sekolah terutama melalui kunjungan langsung.

Komite sekolah berkomunikasi dengan sekolah dan orang tua melalui pertemuan orang tua yang diselenggarakan sekolah setiap tahun pada awal tahun ajaran. Selain itu, komite sekolah juga biasa melakukan komunikasi secara langsung melalui kunjungan langsung ke sekolah baik secara rutin maupun insidental ketika ada masalah yang perlu dibahas. Komunikasi dengan sekolah juga biasa dilakukan melalui telepon dan pesan singkat. Selain melalui pertemuan di sekolah, pesan terkait pendidikan juga ada yang diumumkan melalui sarana ibadah.

Media lokal melakukan komunikasi melalui peliputan dan pemberitaan. Media biasa mendapat pemberitahuan atau aduan dari masyarakat yang disampaikan melalui pesan singkat. Informasi dari masyarakat tersebut ditindaklanjuti dengan peliputan yang kemudian disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan melalui pemberitaan.

#### **d) Kelompok Murid**

Para murid biasanya melakukan komunikasi di antara mereka sendiri secara langsung baik di sekolah maupun di lingkungan rumah mereka. Di dua sekolah yang dikunjungi, para murid juga melakukan komunikasi melalui pesan singkat. Komunikasi murid dengan guru cenderung hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Komunikasi murid dengan guru di luar lingkungan sekolah hanya terjadi di satu SD yang dikunjungi. Di SD tersebut, ada murid yang sering bertanya terkait pelajaran melalui pesan singkat.

## LAMPIRAN 3

**Tabel A1. Daftar Mitra Daerah Potensial dan Ringkasan Wawancara**

Jabatan	Instansi	Ringkasan Wawancara
Kepala dinas	Dinas Dikpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi infrastruktur pendukung masih kurang</li> <li>• Distribusi guru yang tidak merata karena lebih banyak guru memilih di kota</li> <li>• Dukungan anggaran masih kurang, untuk program rutin hanya 2,4% dari APBD</li> <li>• Dominasi politik dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga masing-masing posisi tidak dapat berperan secara maksimal</li> <li>• Kualitas guru masih sangat rendah</li> <li>• Menjamurnya sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan, padahal di wilayah itu sudah cukup sehingga di beberapa lokasi terjadi "rebutan" murid</li> <li>• Nilai akreditasi sekolah SD dan SMP masih rendah, rata-rata C</li> <li>• Jumlah guru kontrak honorer daerah cukup banyak, menyedot anggaran tetapi kualitasnya rendah</li> <li>• Kepedulian orang tua untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi kepedulian untuk membimbing anaknya sangat rendah, seolah-olah murid hanya menjadi tanggung jawab sekolah</li> <li>• Untuk anak berkebutuhan khusus baru tersedia SLB, sedangkan pendidikan inklusi belum berjalan karena masalah ketersediaan guru yang memiliki kemampuan tersebut</li> </ul>
Sekretaris - Kasubag Program	Dinas Dikpora	Tidak terlibat dalam wawancara mendalam tetapi saat FGD cukup aktif mengemukakan pendapat
Kabag Sosbud	Bappeda	<p>Dilihat dari neraca pendidikan Provinsi NTB, angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) SD dan SMA di Kabupaten Bima menempati posisi 3 besar, setelah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Sementara itu, untuk tingkat SMP, APK dan APM Kabupaten Bima menduduki peringkat terbawah. Untuk indeks pembangunan manusia (IPM), Provinsi NTB menempati urutan ke-31 secara nasional. Sementara itu, untuk Kabupaten Bima, nilai IPM mencapai 67%, masih jauh dibandingkan dengan rata-rata IPM nasional, yaitu sekitar 80%.</p> <p>Hal itu karena kesadaran orang tua di Bima untuk menyekolahkan anak-anaknya mereka cukup tinggi, minimal hingga tingkat SMA. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya ekonomi masyarakat.</p> <p>Ada beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bima di bidang pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidakmerataan distribusi guru</li> <li>• Kualitas guru yang dianggap masih rendah</li> <li>• Kuantitas guru PNS yang dianggap masih rendah</li> <li>• Akses masyarakat di wilayah terpencil terhadap sekolah masih sangat terbatas</li> <li>• Masih kurangnya sekolah yang khusus menangani anak berkebutuhan khusus</li> <li>• Kemampuan literasi dan numerasi rendah karena kurangnya minat baca murid, kurangnya fasilitas buku dan perpustakaan di sekolah, serta kurangnya wawasan pengetahuan murid karena sangat terbatasnya akses terhadap informasi</li> </ul>
Kepala Administrasi	Sekda	<p>Masalah pendidikan di Kabupaten Bima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses pendidikan tidak merata; khususnya di wilayah pulau terpencil, akses masih rendah</li> </ul>

Jabatan	Instansi	Ringkasan Wawancara
Kesejahteraan Rakyat		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan baca anak masih rendah; di beberapa tempat, anak kelas 4 belum bisa membaca dan berhitung</li> <li>• Distribusi guru kurang merata</li> <li>• Profesionalisme guru dengan sertifikasi tidak berbanding lurus; sertifikasi tidak digunakan untuk meningkatkan kualitas guru</li> <li>• Kualitas guru masih rendah</li> <li>• Guru PNS malas, terutama setelah banyak guru sukarela yang masuk dan menggantikan jam mengajar mereka</li> <li>• Tidak ada komunikasi antara orang tua dan sekolah terkait pembelajaran</li> <li>• Anggaran masih kurang; perencanaan anggaran juga belum baik</li> </ul>
Ketua Komisi D	DPRD	<p>Informan tidak berlatar belakang dunia pendidikan, tetapi sangat tertarik dengan masalah pendidikan sehingga memilih terlibat di Komisi IV DPRD.</p> <p>Menurut informan, kondisi umum pendidikan di Kabupaten Bima belum ada kemajuan karena kuatnya pengaruh politik, khususnya dalam penempatan orang-orang di posisi pejabat yang diisi oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai orang pendidikan. Dari sisi penganggaran, perencanaan program-program pendidikan belum matang sehingga pelaksanaannya belum sesuai dengan sasaran. Kondisi riil pendidikan belum sesuai dengan target. Data dan fakta (kondisi lapangan) dalam perencanaan program ada yang belum sesuai dengan penganggaran yang diajukan kepada pihak legislatif.</p>
Pembina	LSM YISA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan literasi dan numerasi murid di NTB rendah; walaupun terkadang data dari Dinas Dikpora menunjukkan hasil sebaliknya, kondisi di lapangan tidak sesuai</li> <li>• Orang tua tidak lagi peduli terhadap kondisi sekolah</li> <li>• Sebagian guru tidak memiliki gairah untuk mencerdaskan anak didiknya, hanya sekadar menjalankan kewajibannya</li> <li>• Aspek politik terlalu besar dalam memengaruhi dunia pendidikan (dalam pembangunan sarana dan prasarana, kenaikan jabatan)</li> <li>• Keberpihakan anggaran kabupaten bagi dunia pendidikan masih kurang</li> <li>• Proses perencanaan dalam dunia pendidikan tidak berjalan dengan baik</li> <li>• Kualitas guru sangat rendah. Sertifikasi dan tunjangan guru tidak berbanding lurus dengan kualitas</li> <li>• Guru mata pelajaran tidak sesuai dengan disiplin ilmu guru</li> <li>• Anak sering kali diajak orang tua ke ladang atau melaut sehingga sering meninggalkan jam sekolah</li> <li>• Implementasi regulasi pendidikan masih kurang walaupun regulasinya sudah ada dan baik</li> <li>• Pengawasan dari komite sekolah masih kurang</li> <li>• Kontrol dan perhatian orang tua terhadap hasil pembelajaran anak sangat kurang</li> </ul>
Pengawas Pendidikan SMP	Pengawas SMPN A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk SMP, masih banyak kepala sekolah yang belum paham mengenai RKJM yang hanya itu-itunya terus dan tidak berkembang</li> <li>• Proses KBM dan pelaksanaannya masih reguler dan rutin, belum ada inovasi yang membuat pembelajaran lebih berkembang</li> <li>• Komitmen guru PNS agak kurang; sebagian guru PNS bersertifikasi menyerahkan tugas KBM-nya ke guru honorer</li> <li>• Masih banyak kepala sekolah yang tidak menguasai model perencanaan sekolah tahunan dan jangka panjang; sebagian besar membuat RKJM hanya sebagai formalitas pemenuhan administrasi (<i>copy-paste</i> dari dokumen yang ada di internet atau dari SMP lain) sehingga rencana</li> </ul>

Jabatan	Instansi	Ringkasan Wawancara
		<p>sekolah susah diwujudkan karena tidak berbasis pada kondisi dan kebutuhan sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas guru masih menjadi masalah akibat kurangnya pelatihan untuk guru PNS, apalagi untuk guru-guru honorer</li> <li>• Rendahnya peran serta masyarakat terhadap pelajaran anak</li> <li>• Masalah ketersediaan alat bantu pendidikan bagi murid</li> <li>• Dominannya faktor politik dalam penyelenggaraan pendidikan</li> </ul>
Kepala sekolah	SDN A	<p>Masalah pendidikan yang dihadapi sekolah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana (ruang kelas, alat peraga, buku penunjang, LCD komputer) belum memadai</li> <li>• Kemampuan guru masih rendah; 99% guru sudah S-1, tetapi latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan bidang ajarnya</li> <li>• Pelatihan untuk guru masih kurang sehingga guru tidak bisa meningkatkan kompetensinya</li> <li>• Dukungan orang tua masih kurang, terutama dalam hal penyediaan dana karena adanya dana dari BOS dan BSM</li> </ul> <p>(Informan beberapa kali menjadi juara lomba guru teladan provinsi, kepala sekolah teladan provinsi, guru menulis provinsi, kreativitas guru nasional, dan mendapat satya lencana dari presiden)</p>
Kepala sekolah	SDN B	<p>Masalah pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana sekolah, seperti buku di perpustakaan, peralatan labotarium, dan alat peraga, masih kurang</li> <li>• Sebaran bantuan tidak merata (kedekatan secara politik)</li> <li>• Tidak ada tenaga khusus untuk mengurus perpustakaan</li> <li>• Di beberapa sekolah ada titipan pesan terkait dukungan dari sejumlah pihak, terutama menjelang pilkada</li> <li>• Jumlah guru sukarela terlalu banyak; di beberapa sekolah ada hingga 80 guru sukarela untuk satu sekolah</li> <li>• Guru, khususnya guru yang tidak lama lagi pensiun, tidak mau mengembangkan kompetensi</li> <li>• Pengaruh televisi membuat anak malas belajar</li> <li>• Dukungan dan dorongan orang tua agar anak giat belajar kurang</li> <li>• Kondisi sosial-politik membuat guru sering kali terlibat dalam urusan politik</li> <li>• Sekolah sering kali meluluskan anak yang dinilai tidak berprestasi agar anak tidak putus sekolah</li> </ul>

## LAMPIRAN 4

Tabel A2. Matriks Nilai Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
Dinas Dikpora Kabupaten:	Tinggi Alasan: Dinas Dikpora merupakan <i>leading sector</i> yang mengelola pendidikan, hanya saja harus mendapat input yang cukup mengenai kualitas pembelajaran karena fokus dinas biasanya menyangkut tanggung jawab rutin	Tinggi Alasan: kualitas pembelajaran yang rendah menyebabkan Dinas Dikpora sangat tidak nyaman karena mereka mengelolanya	Tinggi Alasan: karena Dinas Dikpora merupakan <i>leading sector</i> yang mengelola pendidikan, tetapi upaya peningkatan kualitas pendidikan masih kurang signifikan karena prioritas anggaran mereka adalah pada kegiatan rutin yang fokusnya bukan membidik peningkatan kualitas pembelajaran yang menyangkut numerasi dan literasi	Tinggi Alasan: Dinas Dikpora merupakan <i>leading sector</i> yang melakukan tugas pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi bidang. Hanya saja, Dinas Dikpora tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan program yang terkait dengan pendanaan karena keputusannya ada pada bupati dan DPRD
DPRD	Tinggi Alasan: DPRD mempunyai kewenangan terkait penganggaran, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, dan pembuatan regulasi/kebijakan	Tinggi Alasan: DPRD mempunyai kepedulian dan ketertarikan tinggi terhadap pendidikan	Tinggi-Rendah Alasan: pengaruh DPRD secara formal tinggi karena menentukan anggaran dan regulasi tinggi, tetapi pengaruh langsungnya masih rendah karena keterbatasan anggaran dan data/informasi	Tinggi Alasan: DPRD mempunyai kewenangan menetapkan anggaran dan regulasi, dan dapat melakukan perintah, serta kontrol dan koordinasi terhadap/dengan Dinas Dikpora dan bupati
Bappeda	Menengah Alasan: Bappeda hanya sebatas mendorong proses perencanaan, dan melakukan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi	Tinggi Alasan: tugasnya berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai melalui peningkatan tingkat pendidikan dan kualitas pembelajaran	Tinggi Alasan: Bappeda pernah terlibat mengoordinasi pemangku kepentingan dalam upaya pembuatan Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kualitas Guru dan Perbup No. 39 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan di Kabupaten Bima	Tinggi Alasan: Bappeda berpotensi dalam melakukan koordinasi dan memastikan semua kebijakan terkait pendidikan terkoneksi dengan SKPD lain; masalah pendidikan tidak sebatas tanggung jawab Dinas Dikpora, tetapi juga bisa bersentuhan dengan lembaga lain, seperti desa, Dinsos, Dinas Kesehatan, bupati, DPRD, ornop, dan sebagainya
Sekda	Tinggi Alasan: secara kelembagaan sekda bisa ikut menentukan dalam memengaruhi kualitas pendidikan	Tinggi Alasan: sekda ingin agar semua program kabupaten berjalan dengan baik,	Menengah Alasan: sekda berpotensi dalam menentukan kualitas pembelajaran belum dilakukan secara optimal	Tinggi Alasan: sekda merupakan kepanjangan tangan bupati sehingga sangat penting untuk

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
	dan pembelajaran, terutama dari segi kewenangan yang melekat secara kelembagaan	termasuk di bidang pendidikan		dilibatkan dalam pendidikan dan pembelajaran, terutama yang menyangkut regulasi dan koordinasi
Dewan Pendidikan	Menengah Alasan: Dewan Pendidikan tidak memiliki kewenangan langsung terkait peningkatan kualitas pembelajaran. Peran Dewan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan seolah-olah hanya sebagai pelengkap	Tinggi Alasan: Dewan Pendidikan selama ini sudah melakukan perannya meskipun tanpa dukungan yang memadai. Sebagai lembaga yang independen, setiap tahunnya Dewan Pendidikan melakukan evaluasi terhadap mutu pelayanan pendidikan dan menyampaikan rekomendasi ke bupati/Dinas Dikpora	Rendah Alasan: peran Dewan Pendidikan adalah mengonsolidasi komite-komite sekolah untuk mengawasi mutu pelayanan sekolah untuk peningkatan kualitas mutu pembelajaran. Hanya saja, karena anggaran sangat terbatas, baru sedikit yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dalam melakukan pendampingan dan mendorong peningkatan kapasitas komite sekolah	Menengah Alasan: Dewan Pendidikan dapat memberikan masukan kepada berbagai lembaga terkait pendidikan dan dianggap sebagai sesepuh pendidikan meskipun rekomendasinya belum tentu sepenuhnya didengarkan
PGRI	Menengah Alasan: PGRI merupakan organisasi guru yang tupoksinya memfasilitasi, membantu membela hak-hak, kesejahteraan, dan kepentingan guru	Tinggi Alasan: informan mempunyai perhatian tinggi terhadap pembelajaran dan sekaligus menjadi koordinator pengawas kabupaten	Rendah Alasan: perannya lebih terbatas untuk membela guru. Ada upaya peningkatan kualitas guru melalui seminar, tetapi hasilnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tidak nyata	Rendah Alasan: PGRI hanya menjadi lembaga pelengkap dan pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan dan cenderung hanya untuk membela kepentingan guru yang terkait dengan kesejahteraan
LSM YISA	Tinggi Alasan: YISA memiliki rekam jejak dalam sejumlah program pendidikan, pendampingan, dan pengawasan, serta pernah terlibat dalam pembuatan peraturan daerah terkait pendidikan	Tinggi Alasan: YISA merupakan ornop yang mempunyai fokus pada isu-isu pendidikan	Menengah Alasan: meskipun YISA bukan lembaga yang memiliki otoritas untuk membuat kebijakan, ide dan pendapatnya sering kali dijadikan rujukan oleh lembaga terkait seperti keterlibatannya dalam pembuatan peraturan daerah terkait pendidikan	Tinggi Alasan: YISA bisa dilibatkan dalam proses pendampingan sejumlah program; YISA juga memiliki jejaring dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa dan sekolah
Media lokal	Menengah Alasan: wartawan hanya terlibat sebatas kegiatan peliputan dan pemberitaan jika terdapat kasus atau bahan pemberitaan yang menarik	Tinggi Alasannya: informan dapat melakukan peliputan dan pemberitaan, serta dirinya berlatar belakang dunia pendidikan	Rendah Alasan: media telah berupaya untuk memberitakan masalah pendidikan, akan tetapi masukan-masukan itu masih dipandang sebagai bentuk sentimen media terhadap pemda. Selain itu, hasil liputan tidak selalu	Menengah Alasan: media bisa menjadi sumber peliput dan sumber pemberitaan terkait pembelajaran dan program yang akan dilakukan sehingga bisa menjadi sumber ide bagi

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Kepentingan tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
			bisa diberitakan karena terganjal kepentingan kelembagaan media yang mempunyai hubungan dengan instansi pengelola	lembaga/daerah/sekolah lain
Kantor Cabang Dinas Pendidikan/ UPTD Bolo	Menengah Alasan: UPTD merupakan kepanjangan tangan Dinas Dikpora di tingkat kecamatan; namun, perannya cenderung hanya dilakukan melalui rapat koordinasi bulanan dan sistem pelaporan	Menengah Alasan: peningkatan kualitas pembelajaran merupakan tugas dan kewenangannya; kepala UPTD juga ingin terlibat, tetapi kurang memiliki semangat dan memiliki rencana berkonsentrasi pada usaha pribadi (mungkin terkait dukungan politik)	Rendah Alasan: sebagai pengendali mutu, pelaksanaannya tidak terlalu efektif dalam peningkatan mutu pembelajaran. Kualitas pembelajaran lebih banyak ditentukan oleh sekolah dan kebijakan dari kabupaten	Menengah Alasan: UPTD dapat mengkoordinasi sekolah di tingkat kecamatan, tetapi peran nyatanya masih rendah
Kantor Cabang Dinas Pendidikan/ UPTD Palibelo	Menengah Alasan: UPTD merupakan kepanjangan tangan Dinas Dikpora di tingkat kecamatan; namun, perannya cenderung hanya dilakukan melalui rapat koordinasi bulanan dan sistem pelaporan	Menengah Alasan: peningkatan kualitas pembelajaran merupakan tugas dan kewenangannya; namun, kepala UPTD saat ini akan segera pensiun	Rendah Alasan: sebagai pengendali mutu, pelaksanaannya tidak terlalu efektif dalam peningkatan mutu pembelajaran; kualitas pembelajaran lebih banyak ditentukan oleh sekolah dan kebijakan dari kabupaten	Menengah Alasan: UPTD dapat mengkoordinasi sekolah di tingkat kecamatan, tetapi peran nyatanya masih rendah
Pengawas sekolah SMPN A	Tinggi Alasan: pengawas sekolah memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja guru dan kepala sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dampaknya adalah peningkatan kualitas pembelajaran; hasil evaluasi dan penilaian terhadap proses pengawasan akademik dan manajerial digunakan untuk perencanaan peningkatan manajerial sekolah dan peningkatan kapasitas guru	Tinggi Alasan: peningkatan kualitas pembelajaran sudah menjadi tupoksinya	Menengah Alasan: meskipun tupoksinya adalah untuk memastikan bahwa sekolah dapat memenuhi standar kualitas KBM, pada kenyataannya pengawas sekolah tidak bisa melakukan tindakan komprehensif terhadap hasil pengawasan tersebut; yang memiliki kewenangan adalah Dinas Dikpora sehingga ketika rekomendasinya tidak dijalankan, pengawas tidak dapat melakukan apa-apa	Menengah Alasan: posisi pengawas SMP hanya sebagai pelaksana yang bisa merekomendasikan, tetapi tidak bisa melakukan tindakan; dalam keputusan yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran yang paling menentukan adalah Dinas Dikpora dan bupati

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
Pengawas sekolah SMPN B	Tinggi Alasan: pengawas sekolah sangat berkontribusi dalam melakukan pengawasan dan penilaian kinerja sekolah sehingga mutu pelayanan bisa terjaga dengan baik	Tinggi Alasan: pengawas sekolah sebagai bagian dari struktur pendidikan memiliki kemauan untuk terlibat sesuai dengan fungsinya. Pendidikan tidak berkualitas membuat malu pengawas sekolah	Rendah Alasan: hasil penilaian pengawas sekolah sering kali tidak digunakan oleh kabupaten dalam upaya memperbaiki pembelajaran dan pelaksanaan kebijakan pendidikan	Tinggi Alasan: dengan memaksimalkan peran pengawas sekolah, kontrol pelayanan akan lebih terjaga, termasuk memastikan bahwa laporan pengawas sekolah digunakan oleh pengambil kebijakan sesuai dengan fakta di lapangan
Pengawas sekolah SDN A	Tinggi Alasan: pengawas sekolah berperan dalam peningkatan kualitas pembelajaran karena bertugas melakukan penilaian dan pendampingan terhadap guru dan kepala sekolah yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pendidikan	Menengah Alasan: sebagai pribadi pengawas sekolah merasa tidak bisa berkontribusi lebih besar karena ada kemungkinan terkena mutasi akibat mendukung calon yang kalah	Rendah Alasan: pengawas sekolah hanya memberi rekomendasi yang belum tentu ditindaklanjuti oleh Dinas Dikpora; pada umumnya, mutasi dan rotasi, serta proses peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah sangat sarat pengaruh politik	Menengah Alasan: pengawas sekolah SD menduduki posisi yang vital tetapi tidak bisa menentukan sehingga tidak dapat memberi kontribusi maksimal ketika pemangku kepentingan di atasnya tidak melakukan tindakan sesuai dengan hasil rekomendasi mereka
Pengawas sekolah SDN B	Tinggi Alasan: pengawas sekolah sangat berkontribusi dalam melakukan pengawasan dan penilaian kinerja sekolah sehingga mutu pelayanan bisa terjaga dengan baik	Tinggi Alasan: pengawas sebagai bagian dari struktur pendidikan memiliki kemauan untuk terlibat sesuai dengan fungsinya	Rendah Alasan: hasil penilaian pengawas sekolah sering kali tidak digunakan oleh kabupaten untuk memperbaiki pembelajaran	Tinggi Alasan: dengan memaksimalkan peran pengawas sekolah, kontrol pelayanan akan lebih terjaga, termasuk memastikan laporan pengawas sekolah digunakan oleh pengambil kebijakan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan
Kepala sekolah SMPN A	Tinggi Alasan: kepala sekolah merupakan pengambil kebijakan tertinggi di sekolah sehingga perannya sangat penting dalam memengaruhi pembelajaran	Tinggi Alasan: kepala sekolah tentu saja memiliki keinginan untuk meningkatkan hasil pembelajaran walaupun dalam praktiknya usaha tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan	Menengah Alasan: belum ada kebijakan dan inovasi dari sekolah untuk menjawab permasalahan pembelajaran yang dihadapi murid dan sekolah, tetapi sekolah mendukung upaya peningkatan kualitas dalam bentuk mendorong murid untuk tidak membolos dan mendukung penerapan kebijakan membaca di perpustakaan	Tinggi Alasan: penting untuk melibatkan kepala sekolah dan memaksimalkan potensi dan kewenangan yang dimilikinya dalam meningkatkan pembelajaran

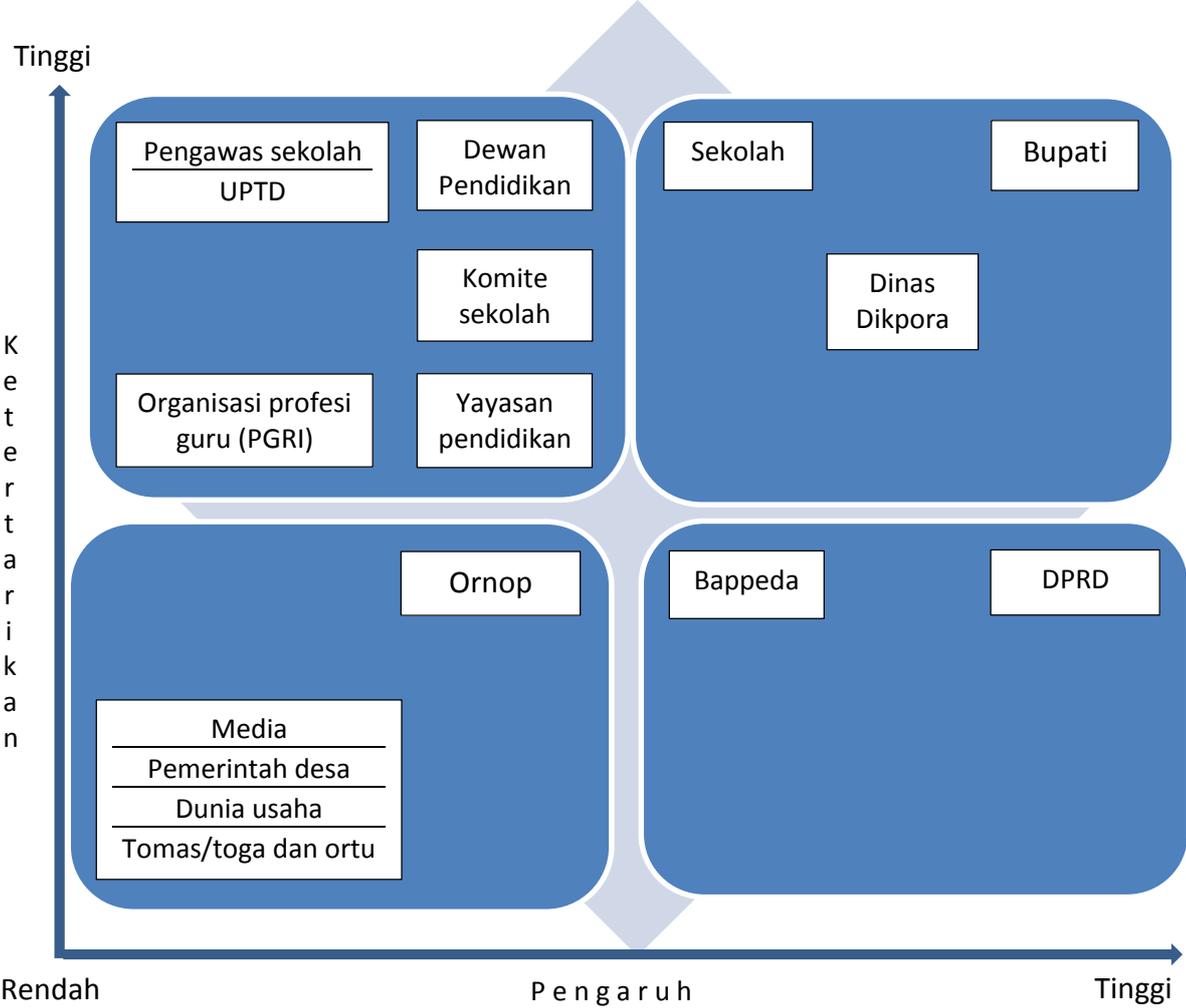
Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Kepentingan tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
Kepala sekolah SMPN B	Menengah Alasan: kepala sekolah merupakan pengambil kebijakan tertinggi di sekolah sehingga perannya sangat penting dalam memengaruhi pembelajaran	Tinggi Alasan: kepala sekolah tentu saja memiliki keinginan untuk meningkatkan hasil pembelajaran walaupun dalam praktiknya usaha tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan	Menengah Alasan: belum ada kebijakan dan inovasi dari sekolah untuk menjawab permasalahan pembelajaran yang dihadapi murid dan sekolah, tetapi sudah ada upaya mendisiplinkan guru dan memberi motivasi kepada murid	Tinggi Alasan: penting untuk melibatkan kepala sekolah dan memaksimalkan potensi dan kewenangan yang dimilikinya dalam meningkatkan pembelajaran
Kepala sekolah SDN A	Tinggi Alasan: kepala sekolah merupakan pengambil kebijakan tertinggi di sekolah sehingga perannya sangat penting dalam memengaruhi pembelajaran	Tinggi Alasan: kepala sekolah memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan sangat antusias untuk terlibat dalam perubahan	Tinggi: Alasan: kepala sekolah memotivasi murid untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas melalui pemberian penghargaan kepada murid berprestasi dan memotivasi guru untuk tidak terlambat; sebagai hasilnya, sekolah ini termasuk sekolah berkualitas di tingkat kecamatan, bahkan tingkat kabupaten	Tinggi Alasan: penting untuk melibatkan kepala sekolah dan memaksimalkan potensi dan kewenangan yang dimilikinya dalam meningkatkan pembelajaran
Kepala sekolah SDN B	Tinggi Alasan: kepala sekolah merupakan pengambil kebijakan tertinggi di sekolah sehingga perannya sangat penting dalam memengaruhi pembelajaran	Tinggi Alasan: kepala sekolah tentu saja memiliki keinginan untuk meningkatkan hasil pembelajaran walaupun dalam praktiknya usaha tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan	Menengah Alasan: walaupun sudah ada langkah konkret seperti upaya mendisiplinkan guru dan memberi pelatihan, hasilnya belum bisa dilihat	Tinggi Alasan: penting untuk melibatkan kepala sekolah dan memaksimalkan potensi dan kewenangan yang dimilikinya dalam meningkatkan pembelajaran
Komite sekolah SMPN A	Menengah Alasan: tugas komite sekolah hanya sebatas menjadi mitra sekolah dan salah satu fungsinya adalah ikut mengawasi pelayanan sekolah; akan tetapi, jika dilakukan dengan maksimal, fungsi ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	Menengah Alasan: komite sekolah mempunyai kemauan untuk terlibat tetapi memiliki pekerjaan lain	Rendah Alasan: komite sekolah tidak melakukan kontrol terhadap pembelajaran, cenderung hanya terlibat dalam pembangunan fisik sekolah	Menengah Alasan: komite sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan, maka pengaruhnya akan sangat besar jika perannya berjalan maksimal; komite sekolah merupakan media kontrol orang tua dan masyarakat terhadap mutu pendidikan; keterlibatan aktif komite sekolah akan berdampak pada kualitas pembelajaran

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
Komite sekolah SMPN B	Menengah Alasan: tugas komite sekolah hanya sebatas menjadi mitra sekolah dan salah satu fungsinya adalah ikut mengawasi pelayanan sekolah; namun, jika dilakukan dengan maksimal, fungsi ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	Menengah Alasan: komite sekolah mempunyai kemauan untuk terlibat, tetapi memiliki pekerjaan lain	Rendah Alasan: komite sekolah tidak melakukan kontrol terhadap pembelajaran dan cenderung hanya terlibat dalam pembangunan fisik sekolah	Menengah Alasan: komite sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan, maka akan berpengaruh pada kualitas jika perannya berjalan maksimal; komite sekolah merupakan media kontrol orang tua dan masyarakat terhadap mutu pendidikan; keterlibatan aktif komite sekolah akan berdampak pada kualitas pembelajaran
Komite sekolah SDN A	Menengah Alasan: tugas komite sekolah hanya sebatas menjadi mitra sekolah dan salah satu fungsinya adalah ikut mengawasi pelayanan sekolah; namun, jika dilakukan dengan maksimal, fungsi ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	Menengah Alasan: komite sekolah mempunyai kemauan untuk terlibat, tetapi memiliki pekerjaan lain	Rendah Alasan : komite sekolah dalam pelaksanaannya hanya menjadi "stempel" sekolah; komite sekolah tidak berpengaruh nyata dalam upaya meningkatkan pembelajaran walaupun potensinya ada	Menengah Alasan: komite sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan, maka akan berpengaruh pada kualitas jika perannya berjalan maksimal; komite sekolah merupakan media kontrol orang tua dan masyarakat terhadap mutu pendidikan; keterlibatan aktif komite sekolah akan berdampak pada kualitas pembelajaran
Komite sekolah SDN B	Menengah Alasan: tugas komite sekolah hanya sebatas menjadi mitra sekolah dan salah satu fungsinya adalah ikut mengawasi pelayanan sekolah; namun, jika dilakukan dengan maksimal, fungsi ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	Menengah Alasan: komite sekolah mempunyai kemauan untuk terlibat, tetapi memiliki pekerjaan lain	Rendah Alasan: komite sekolah dalam pelaksanaannya hanya menjadi "stempel" sekolah; komite sekolah tidak berpengaruh nyata dalam upaya meningkatkan pembelajaran walaupun potensinya ada	Menengah Alasan: komite sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan, maka akan berpengaruh pada kualitas jika perannya berjalan maksimal; komite sekolah merupakan media kontrol orang tua dan masyarakat terhadap mutu pendidikan; keterlibatan aktif komite sekolah akan berdampak pada kualitas pembelajaran
Kepala desa 1	Rendah Alasan: pemerintah desa hanya bisa berperan dalam mendorong orang tua agar lebih	Menengah Alasan: ada kemauan kepala desa untuk terlibat, tetapi sifatnya hanya menunggu ajakan kepala sekolah untuk	Rendah Alasan: belum ada upaya kepala desa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Menengah Alasan: kepala desa berpotensi untuk memengaruhi masyarakat agar lebih

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
	memperhatikan pendidikan anaknya dan memiliki tugas rutin di luar bidang pendidikan	membahas permasalahan penyelenggaraan pendidikan		memperhatikan pendidikan anaknya
Kepala desa 2	Rendah Alasan: pemerintah desa hanya bisa berperan dalam mendorong orang tua agar lebih memperhatikan pendidikan anaknya dan memiliki tugas rutin di luar bidang pendidikan	Menengah Alasan: kepala desa sangat ingin terlibat dalam penyelesaian masalah pendidikan dan hal tersebut dibuktikan ketika ia menangani masalah pelecehan murid oleh oknum guru; hanya saja, upaya dialog belum terjadi baik dengan sekolah maupun komite sekolah	Rendah Alasan: belum ada upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Menengah Alasan: kepala desa berpotensi untuk memengaruhi masyarakat agar lebih memperhatikan pendidikan anaknya

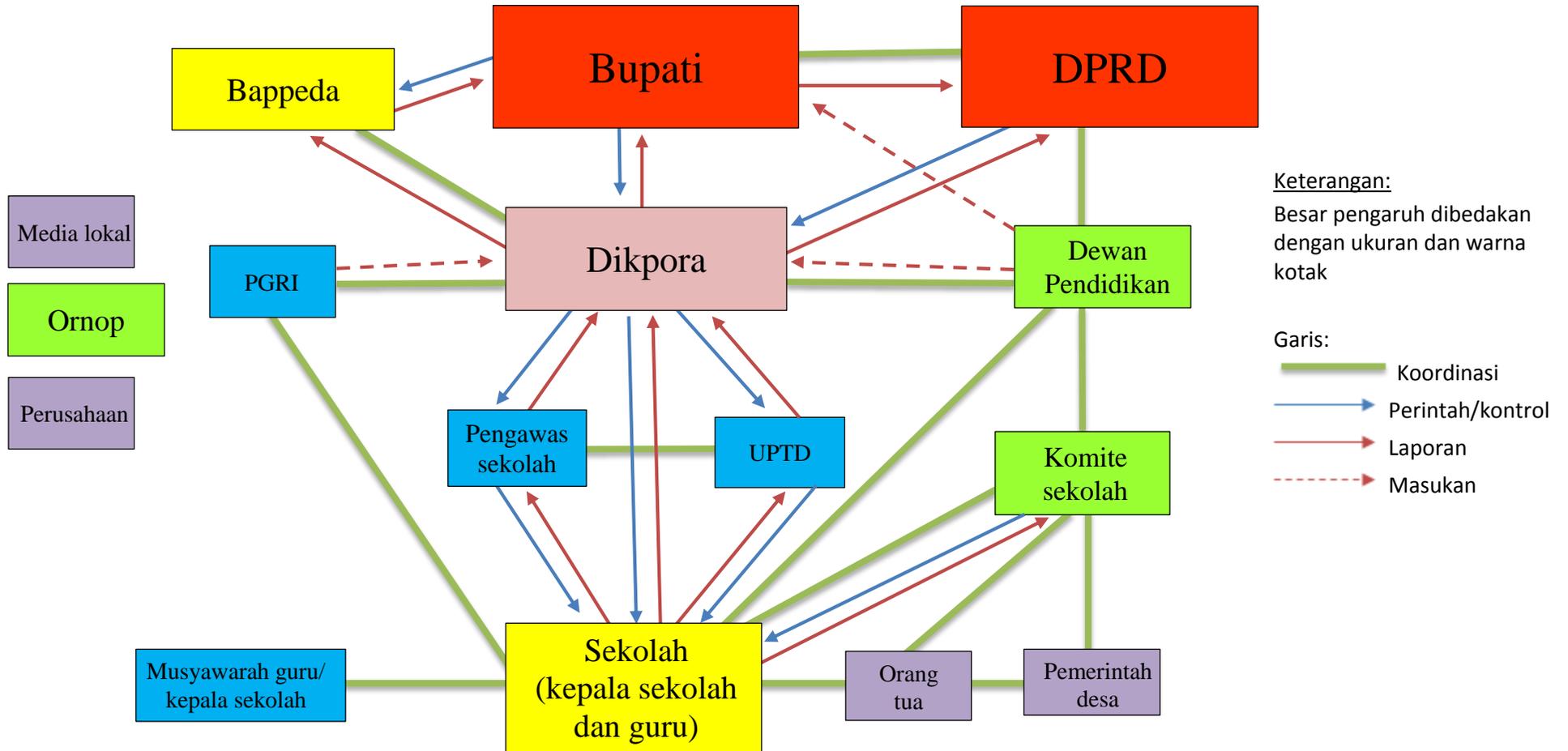
# LAMPIRAN 5

Gambar A1. Peta Pemangku Kepentingan



## LAMPIRAN 6

Gambar A2. Analisis Jejaring Pemangku Kepentingan



## LAMPIRAN 7

**Tabel A3. Metode Komunikasi Informan**

No.	Pemangku Kepentingan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan
1	Dinas Dikpora	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Telepon, pesan singkat, surat pemberitahuan/edaran, surat undangan, pertemuan, laporan	Terdapat pertemuan rutin para pengawas SMP (setiap Selasa), pertemuan UPTD, kunjungan kepala sekolah
2	Bappeda	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Telepon, pesan singkat, WhatsApp, surat undangan, pertemuan	Musrenbang dilakukan setahun sekali; rapat koordinasi dilakukan sesuai dengan kondisi (jika ada permasalahan yang harus diselesaikan)
3	Sekda	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Telepon, pesan singkat, surat undangan, pertemuan	Rapat koordinasi ketika ada permasalahan dan pelaksanaannya lintas sektor
4	DPRD: Ketua Komisi D	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Telepon, pesan singkat, Facebook, pertemuan, surat	Pertemuan dilakukan saat reses (DPRD mengunjungi masyarakat) dan saat <i>hearing</i> /audiensi di DPRD; telepon/pesan singkat/surat disampaikan langsung oleh masyarakat
5	UPTD Bolo	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Telepon, pesan singkat, surat, pertemuan	Pertemuan kepala sekolah di UPTD tiap bulan; pertemuan UPTD di Dinas Dikpora tiap minggu; laporan bulanan dari sekolah untuk UPTD dan dari UPTD untuk Dinas Dikpora
6	UPTD Palibelo	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Telepon, pesan singkat, pertemuan, laporan	Sekolah memberi laporan kepada UPTD dan UPTD membuat laporan untuk Dikpora setiap bulan; di UPTD, ada pertemuan kepala sekolah tiap bulan dan di Dinas Dikpora ada pertemuan UPTD tiap minggu
7	Pengawas sekolah SDN A	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Pesan singkat, telepon, surat, pertemuan, dan bicara langsung	Pesan singkat dan telepon dilakukan antarpengawas dan dengan guru menyangkut pembinaan dan penjadwalan pengawasan; rapat rutin K3S untuk melakukan pembahasan mengenai RPP; bicara langsung dilakukan ketika melakukan pendampingan untuk peningkatan kapasitas guru dan sekolah
8	Pengawas sekolah SDN B	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Pesan singkat, telepon, laporan	Pertemuan tiap bulan di Dinas Dikpora membahas masalah sekolah; melakukan pengawasan di sekolah tiap bulan
9	Pengawas sekolah SMPN B	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Pertemuan dan pengawasan	Pertemuan rutin setiap bulan di Dinas Dikpora memberikan laporan kondisi guru, kehadiran guru, administrasi guru; pengawasan rutin terhadap sekolah
10	Pengawas sekolah SMPN A	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Pesan singkat, telepon, surat, dan bicara langsung	Pesan singkat dan telepon dilakukan untuk melakukan pembicaraan antarpengawas dan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah; undangan digunakan untuk keperluan

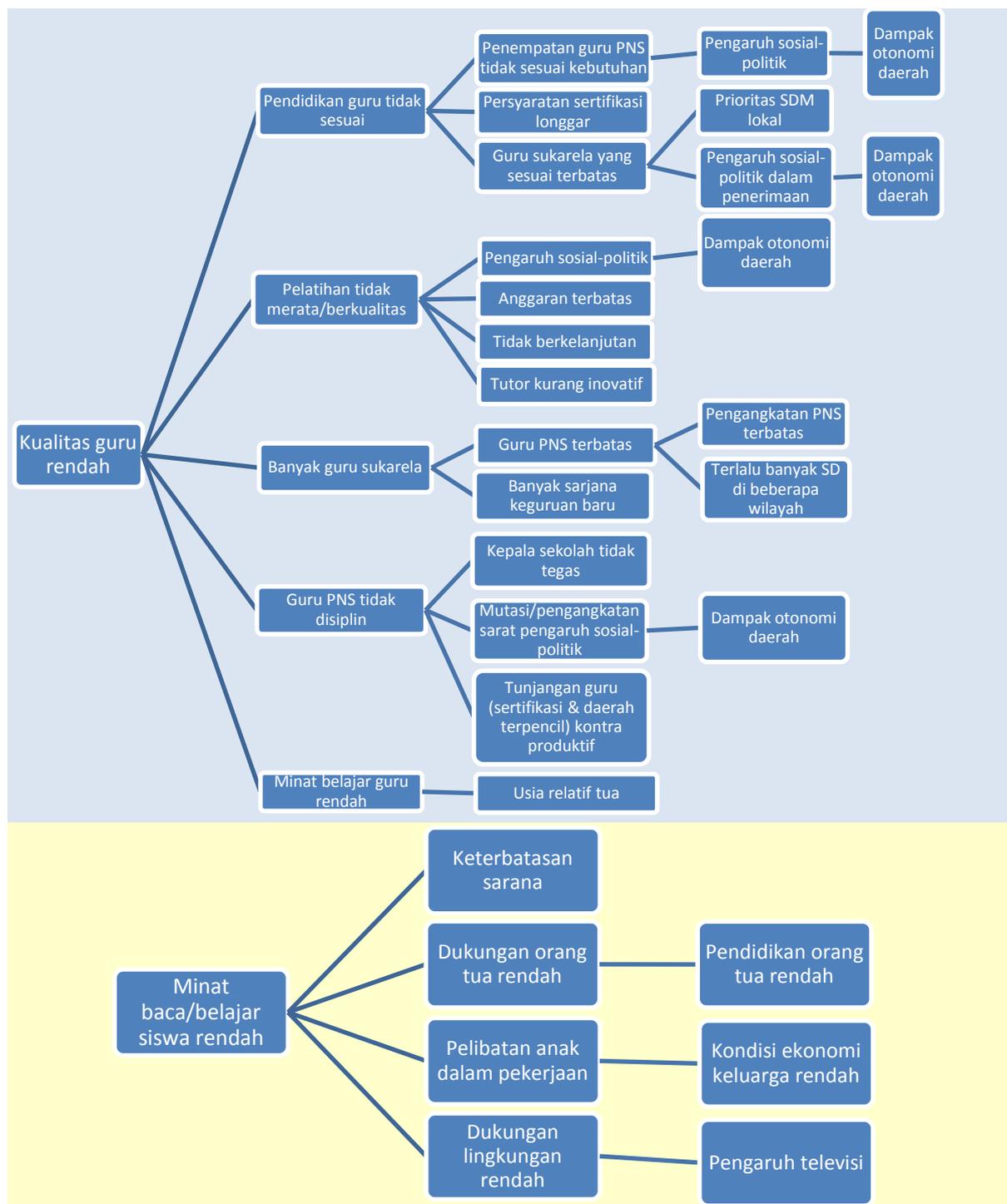
No.	Pemangku Kepentingan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan
				pertemuan evaluasi rutin dan perencanaan bulanan dengan kepala sekolah; bicara langsung dilakukan ketika melakukan proses pendampingan guru-guru untuk peningkatan kapasitas mereka
11	SDN A: Kepala sekolah	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Telepon, pesan singkat, WhatsApp, pertemuan, laporan	Kunjungan pengawas sekolah tiap bulan, pertemuan kepala sekolah tiap bulan, pertemuan dengan orang tua tiap awal tahun (menjelang ujian dan saat terima BSM); laporan disampaikan tiap bulan kepada UPTD
12	SDN B: Kepala sekolah	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Telepon, pesan singkat, surat undangan	Pertemuan kepala sekolah dengan guru tiap Sabtu; pertemuan kepala sekolah di UPTD tiap bulan; pertemuan dengan orang tua murid tiap awal tahun dan menjelang ujian
13	SMPN B: Kepala sekolah	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Telepon, pesan singkat, surat undangan, laporan	Laporan disampaikan ke Dinas Dikpora tiap bulan secara daring (sekolah ada wifi sejak 1 bulan lalu, sebelumnya harus ke warnet); tiap tahun menyampaikan informasi tentang kebutuhan sekolah kepada Dinas Dikpora secara lisan dan tertulis; pertemuan orang tua dilakukan tiap awal tahun
14	SMPN A: Kepala sekolah	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Telepon, pesan singkat, surat undangan, pertemuan	Pertemuan dengan komite sekolah membahas dana bos; pertemuan dengan UPTD membahas laporan dan perkembangan sekolah
15	SDN A: Wawancara kelompok guru	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Telepon, pesan singkat, pertemuan, WhatsApp, Facebook	Pesan singkat untuk komunikasi dengan murid yang kesulitan dalam pelajaran; pesan singkat, telepon, WhatsApp dan Facebook untuk komunikasi dengan sesama guru dalam satu sekolah, satu gugus KKG, atau dengan kenalan guru lainnya (belum ada grup Facebook dan WhatsApp)
16	SDN B: Wawancara kelompok guru	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media suara dan tatap muka	Telepon, pertemuan	Pertemuan guru dengan kepala sekolah; pertemuan sekolah, komite sekolah, dan orang tua; telepon antarguru atau dengan kepala sekolah
17	SMPN B: Wawancara kelompok guru	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Surat, pertemuan, telepon/pesan singkat	Rapat di Dinas Dikpora (diutus kepala sekolah); pertemuan dengan komite sekolah
18	SMPN A: Wawancara kelompok guru	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Surat undangan, pesan singkat dan telepon, internet (surat elektronik, Facebook, WhatsApp)	Rapat rutin guru dan kepala sekolah; komunikasi dengan/kunjungan ke orang tua murid yang bermasalah (masalah dalam pembelajaran atau tidak masuk sekolah tanpa keterangan)
19	Dewan Pendidikan	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Telepon, laporan, kunjungan, pertemuan	Dewan Pendidikan rutin (rata-rata dua kali per tahun) melakukan kunjungan ke sekolah; laporan tahunan disampaikan ke Dinas Dikpora dan bupati sebagai masukan

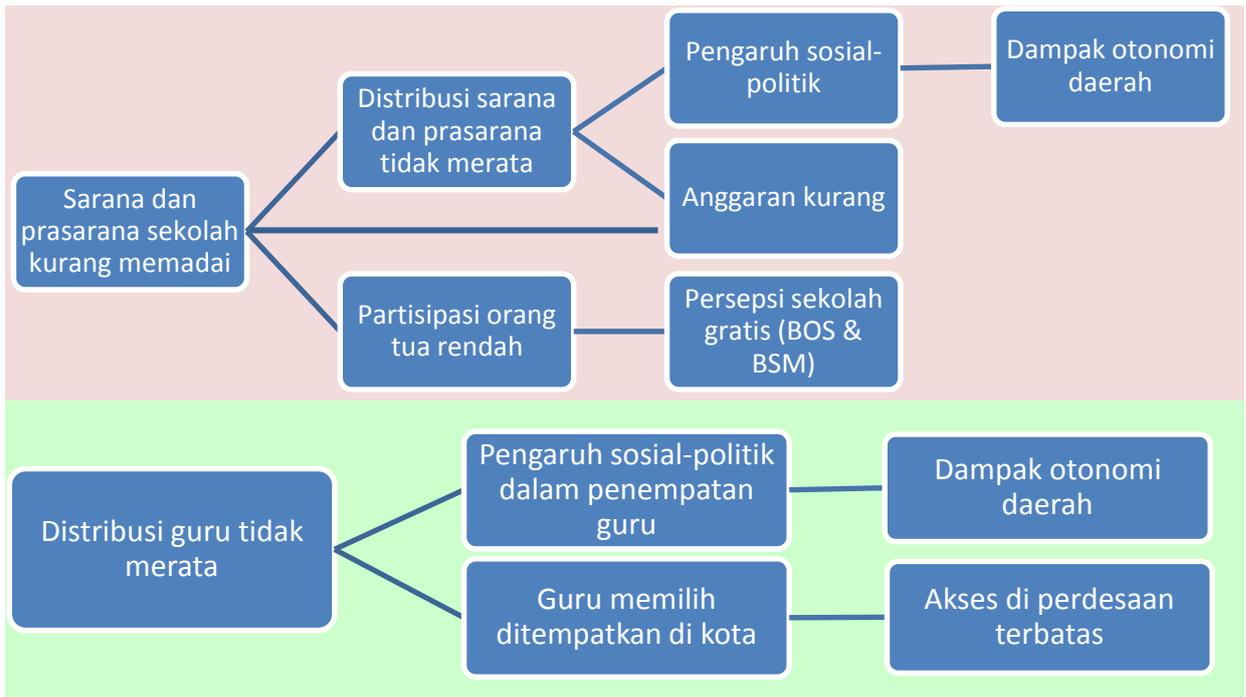
No.	Pemangku Kepentingan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan
20	PGRI	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Telepon, pesan singkat, pertemuan, surat undangan, demonstrasi	Rapat koordinasi struktural PGRI (kabupaten, kecamatan, sekolah) per triwulan dan tahunan; rapat pengurus bersifat tentatif; layanan pengaduan masalah guru/anggota (surat resmi); demonstrasi untuk aksi solidaritas guru
21	LSM YISA	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media suara dan tatap muka	Telepon, pertemuan	Pertemuan dengan pemangku kepentingan dilakukan jika ada keperluan dan atas permintaan untuk mendampingi
22	Media	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Telepon, pesan singkat, peliputan, berita koran	Pesan singkat disampaikan oleh masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan peliputan; penyampaian ke pemangku kepentingan dilakukan melalui pemberitaan
23	SDN A: Komite sekolah	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Telepon, surat undangan, dan pertemuan	Rapat sekolah dengan komite sekolah atau dengan orang tua; biasanya pertemuan tersebut hanya membahas penggunaan dana BOS atau sosialisasi program dan aturan sekolah; jarang membahas kondisi mutu pelayanan sekolah dan masalah yang dihadapi sekolah
24	SDN B: Komite sekolah	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Surat undangan, telepon, pertemuan	Pertemuan dilakukan tidak secara rutin, hanya jika ada keperluan
25	SMPN B: Komite sekolah	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Surat undangan, surat pemberitahuan, pertemuan langsung, pengeras suara tempat ibadah	Untuk pertemuan komite sekolah dengan pihak sekolah, ada undangan dari sekolah; pertemuan atau rapat komite dengan orang tua/wali murid; pendekatan kepada masyarakat dengan imbauan langsung melalui sarana tempat ibadah dan mimbar Jumat untuk pesan-pesan yang berkaitan dengan pendidikan anak kepada warga setempat
26	SMPN A: Komite sekolah	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis, suara, dan tatap muka	Telepon, pesan singkat, pertemuan, surat undangan	Kunjungan ke sekolah dilakukan dua kali per minggu; pertemuan rutin dengan orang tua dilakukan tiap tahun
27	SDN A: Wawancara kelompok orang tua	Komunikasi langsung (tatap muka)	Surat undangan, pertemuan	Tidak ada komunikasi antarorang tua; pertemuan dengan sekolah juga hanya untuk keperluan pengambilan rapor atau saat ada pelajaran ekstrakurikuler
28	SDN B: Wawancara kelompok orang tua	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis dan tatap muka	Pertemuan, surat undangan	Pertemuan akhir semester hanya untuk membagi rapor; pada awal tahun hanya informasi terkait dana bos
29	SMPN B: Wawancara kelompok orang tua	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis dan tatap muka	Surat undangan	Pertemuan dilakukan saat ada pembagian BSM
30	SMPN A: Wawancara	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui	Pertemuan, kunjungan langsung,	Ada orang tua yang aktif mendatangi sekolah untuk menanyakan

No.	Pemangku Kepentingan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan
	kelompok orang tua	media tertulis dan tatap muka	surat undangan, surat pemberitahuan	perkembangan belajar anak; pihak sekolah melakukan kunjungan ke rumah murid (orang tua) yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan
31	Kepala desa 1	Komunikasi langsung (tatap muka)	bicara langsung	Dilakukan terhadap orang tua yang anaknya membolos karena diajak membantu bertani
32	Kepala desa 2	Komunikasi langsung (tatap muka)	bicara langsung	Dilakukan terhadap orang tua yang kurang peduli dengan pendidikan anaknya, terutama mereka yang membawa anaknya bertani
33	SDN A: Wawancara kelompok murid laki-laki	Komunikasi langsung (tatap muka)	Bicara langsung	Dilakukan jika ada pelajaran yang tidak dimengerti: bertanya langsung kepada guru di sekolah dan bertanya kepada kakak atau orang tua saat di rumah
34	SDN A: Wawancara kelompok murid perempuan	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis dan tatap muka	Pesan singkat, bicara langsung	Dilakukan jika ada pelajaran yg tidak dimengerti: mengirim pesan singkat kepada guru, bertanya langsung kepada teman, bertanya langsung kepada guru, belajar berkelompok
35	SDN B: Wawancara kelompok murid laki-laki	Komunikasi langsung (tatap muka)	Mendengarkan dan bicara langsung	Menyelesaikan tugas/PR sekolah secara berkelompok; informasi dan peraturan sekolah disampaikan secara lisan oleh kepala sekolah saat upacara bendera atau oleh guru di kelas
36	SDN B: Wawancara kelompok murid perempuan	Komunikasi langsung (tatap muka)	Bicara langsung	Kerja secara berkelompok menyelesaikan tugas dari sekolah; bertanya teman
37	SMPN B: Wawancara kelompok murid laki-laki	Komunikasi langsung (tatap muka)	Bicara langsung	Di sekolah bertanya langsung kepada teman; tidak berani bertanya kepada guru karena malu/takut; di rumah bertanya kepada kakak/orang tua; belajar secara berkelompok hanya jika ada tugas kelompok saja
38	SMPN B: Wawancara kelompok murid perempuan	Komunikasi langsung (tatap muka)	Bicara langsung	Dilakukan ketika menanyakan pelajaran kepada teman atau kepada guru
39	SMPN A: Wawancara kelompok murid laki-laki	Komunikasi langsung (tatap muka)	Bicara langsung	Di sekolah bertanya langsung kepada teman atau guru; di rumah langsung mendatangi rumah teman
40	SMPN A: Wawancara kelompok murid perempuan	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis dan tatap muka	Pesan singkat dan bicara langsung	Mengirim pesan singkat kepada teman untuk bertanya tentang masalah pelajaran di luar sekolah; jika masih kesulitan, baru bertemu untuk belajar bersama; di sekolah komunikasi secara langsung dengan teman; jika teman tidak bisa, baru bertanya kepada guru

## LAMPIRAN 8

Gambar A3. Analisis Pohon Masalah





## LAMPIRAN 9

**Tabel A4. Analisis Penyelesaian Masalah: Lembaga yang Memiliki Kewenangan dalam Penyelesaian Masalah**

Lembaga yang Berwenang	Dukungan yang Diperlukan	Kapasitas	
		Yang Tersedia	Yang Dibutuhkan
Bupati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen dari DPRD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan mengatur/kebijakan</li> <li>• Regulasi OTDA</li> <li>• Otoritas dalam penempatan guru</li> <li>• SDM tersedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis data pendidikan</li> <li>• Kajian dan pertimbangan/dukungan dari ahli</li> <li>• Dukungan pihak lain (peran lingkungan)</li> <li>• Dukungan anggaran</li> <li>• Kewenangan distribusi guru dan pengangkatan nonpolitis</li> <li>• Dukungan pusat</li> </ul>
Dinas Dikpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen kepala daerah</li> <li>• Dukungan dunia usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda No. 3 Tahun 2012</li> <li>• Sistem pengawasan dan evaluasi berkala</li> <li>• Perbup No. 39 Tahun 2013</li> <li>• Kapasitas SDM kurang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme penganggaran yang lebih ketat</li> <li>• Dukungan anggaran sesuai regulasi</li> <li>• Dukungan dari tokoh masyarakat ulama-umara</li> <li>• Pembuatan basis data guru</li> <li>• Rasionalisasi agar SPM terpenuhi</li> <li>• Distribusi guru nonpolitis</li> <li>• Pemantauan dan evaluasi harus diperketat</li> </ul>
DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen kelembagaan</li> <li>• Komitmen partai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan pengawasan, regulasi, dan penganggaran</li> <li>• Kontrol masyarakat sipil</li> <li>• Input berbagai pihak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPRD melakukan advokasi ke kementerian/pusat</li> <li>• Koordinasi yang intensif antara DPRD dan pemerintah daerah</li> <li>• Perencanaan regulasi pusat harus tepat waktu</li> </ul>
Kepala sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi rekrutmen guru (pembatasan guru sukarela)</li> <li>• Dukungan atasan (pada hasil kontrol terhadap guru, kemampuan perencanaan)</li> <li>• Dukungan orang tua dan komite sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan: mengatur sekolah</li> <li>• Kewenangan kontrol terhadap guru</li> <li>• Perencanaan anggaran dan proses belajar mengajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan pendampingan</li> <li>• Kewenangan rekrutmen guru sukarela berada pada pihak yang lebih tinggi</li> <li>• Memaksimalkan peran kontrol pengawas sekolah dan komite sekolah</li> <li>• Sistem penilaian kinerja kepala sekolah yang ketat</li> <li>• Peningkatan kemampuan perencanaan</li> </ul>

## LAMPIRAN 10

Tabel A5. Kebijakan/Program/Inovasi di Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Bima Sejak 2005

No.	Nama Kebijakan/Inovasi	Sumber Kebijakan/Inovasi	Sifat	Periode Pelaksanaan	Penggagas	Pelaksana	Cakupan	Dampak/Capaian
1	Kabupaten Layak Anak	Pemda	Replikasi program provinsi dan nasional	2012	Pemda (replikasi program pusat dan provinsi)	BPPKB	Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman masyarakat tentang keberadaan anak</li> <li>• Program berbentuk penyuluhan</li> <li>• Orang tua lebih memahami anak</li> </ul>
2	Perda Pendidikan No. 3 Tahun 2012	Pemda	Peraturan daerah	2012	Pemda, DPRD, ornop, lembaga donor	Dinas Dikpora	Kabupaten	Belum ada dampak
3	Perbup No. 39 Tahun 2013	Pemda	Peraturan daerah	2013	Pemda	Dinas Dikpora	Kabupaten	Belum ada dampak
4	Tenaga Kontrak Khusus (30 orang guru SD)	Dinas Dikpora	Peraturan daerah	2014–sekarang	Dinas Dikpora	Dinas Dikpora	Kabupaten	Masih belum terlihat
5	Bima Mengajar	Dinas Dikpora	Replikasi Indonesia Mengajar	2016	Dinas Dikpora dan tokoh pendidikan (replikasi Indonesia Mengajar)	Dinas Dikpora dan pengelola Bima Mengajar	Kabupaten	Memberi inspirasi kepada guru bahwa dengan keterbatasan dana pemerintah, masih ada yang mau mengajar dan semangat mengajar
6	Rubi (Ruang Untuk Berbagi Ilmu)	Dinas Dikpora	Program daerah	2015	Indonesia Mengajar	Pegiat pendidikan di Kabupaten Bima (guru SD, SMP, SMA, kepala sekolah,	Kabupaten	Memberi inspirasi kepada guru bahwa dengan keterbatasan dana pemerintah, masih ada yang mau mengajar dan semangat mengajar

No.	Nama Kebijakan/ Inovasi	Sumber Kebijakan/ Inovasi	Sifat	Periode Pelaksanaan	Penggagas	Pelaksana	Cakupan	Dampak/Capaian
						pengawas sekolah, dan pengajar muda Gerakan Indonesia Mengajar)		
7	Kelas Inspirasi	Dinas Dikpora	Program daerah	2014	Dinas Dikpora dan pengelola Bima Mengajar	Dinas Dikpora	Kabupaten	Memberi inspirasi kepada guru bahwa dengan keterbatasan dana pemerintah, masih ada yang mau mengajar dan semangat mengajar
8	Wahana Edukasi Bima	Dinas Dikpora	Indonesia Mengajar	2016	Indonesia Mengajar	Dinas Dikpora	Kabupaten	Memberi inspirasi kepada guru untuk mengajar dengan baik
9	Membumikan Alquran	Pemerintah daerah	Inisiatif pemda	2016	Bupati	Dinas Dikpora	Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Murid lebih disiplin dan lancar mengaji</li> <li>• Guru juga ikut mengaji</li> <li>• Jumlah TPG menjadi lebih banyak</li> </ul>
10	ProDEP	Pemerintah Australia dan Pemda Bima	Kerja sama Pemerintah Australia dan Pemda Bima	2014–2015	Pemerintah Australia	Sekolah	30 SMP di Kabupaten Bima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dokumen hasil penyusunan RKJM sekolah</li> <li>• Kepala sekolah mengalami peningkatan kapasitas penyusunan rencana</li> </ul>
11	Shalat berjamaah di sekolah	Bupati	Inisiatif bupati	2011	Bupati	Sekolah		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebersamaan di antara murid, guru, dan kepala sekolah lebih kuat</li> </ul>
12	Larangan merokok di lingkungan sekolah	Bupati	Inisiatif bupati	2015	Bupati	Sekolah		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan sekolah bebas asap rokok dan lebih disiplin</li> </ul>
13	Bimbingan calistung untuk kelas 1–3 SD	Kepala sekolah/UPTD	Inisiatif kepala sekolah dan UPTD		Kepala sekolah/ UPTD	Guru sukarela	Sekolah dan kecamatan	Meningkatkan kemampuan murid dalam membaca dan berhitung

## LAMPIRAN 11

Tabel A6. Basis Data Inovasi Daerah Kabupaten Bima

Kebijakan/ Inovasi Utama	Lembaga/Tokoh			Praktik Pelaksanaan				Dampak Kebijakan/Inovasi		Pelajaran yang Dipetik		
	Penggagas/ Agen Pembaharuan (lembaga/ individu)	Agen Pembaharu- an	Pelaksana	Mekanisme	Pembiayaan	Modifikasi	Hambatan	Alasan Berhasil/ Tidak	Kondisi Pendidikan secara Umum	Kualitas Pembelajaran	Pembelajaran dari Kebijakan/ Inovasi	Usulan Peningkat- an Kualitas Pembela- jaran
Kabupaten Layak Anak	Pemda (replikasi program pusat dan provinsi)	Bupati	BPPKB	Meningkatkan kualitas membaca dan berhitung yang dilakukan, antara lain, dengan membangun perpustakaan dan menyediakan bahan bacaan; perpustakaan keliling baru tersedia di tiga kecamatan	APBD sekitar Rp600 juta	Tidak ada modifikasi karena baru dilakukan pada 2015	Anggaran terbatas	Anggaran terbatas	Belum berdampak karena jangkauannya terbatas dan belum lama dilaksanakan (mulai 2015)	Belum berdampak karena jangkauannya terbatas dan belum lama dilaksanakan (mulai 2015)	Tidak ada informasi	Perlunya dukungan anggaran
Perda Pendidikan No. 3 Tahun 2012	Pemda, DPRD, ornop, lembaga donor	Pemda, DPRD, ornop, lembaga donor	Dinas Dikpora	Mengatur pengelolaan dan penyelengga- raan pendidikan, seperti mendorong alokasi 20% APBD untuk pendidikan, peningkatan kualitas guru, mengatur	APBD	Tidak ada modifikasi	Anggaran terbatas	Anggaran terbatas	Dampaknya belum terlihat	Dampaknya belum terlihat	-	Perlunya dukungan anggaran

Kebijakan/ Inovasi Utama	Lembaga/Tokoh			Praktik Pelaksanaan				Dampak Kebijakan/Inovasi		Pelajaran yang Dipetik		
	Penggagas/ Agen Pembaharuan (lembaga/ individu)	Agen Pembaharu- an	Pelaksana	Mekanisme	Pembiayaan	Modifikasi	Hambatan	Alasan Berhasil/ Tidak	Kondisi Pendidikan secara Umum	Kualitas Pembelajaran	Pembelajaran dari Kebijakan/ Inovasi	Usulan Peningkat- an Kualitas Pembela- jaran
				insentif guru terpendil								
Perbup No. 39 Tahun 2013	Pemda	Bupati	Dinas Dikpora	Memberikan petunjuk teknis mengenai SPM pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan	APBD	Tidak ada modifikasi	Anggaran terbatas	Anggaran terbatas	Dampaknya belum terlihat	Dampaknya belum terlihat	-	Perlunya dukungan anggaran
Tenaga Kontrak Khusus (30 orang guru SD)	Dinas Dikpora	Dinas Dikpora	Dinas Dikpora	Mengangkat guru honorer menjadi tenaga kontrak khusus; seleksi dilakukan terhadap guru honorer di daerah terpendil atas dasar informasi dari pengawas, UPTD, dan penduduk sekitar	APBD	Tidak ada modifikasi	Sukar untuk meyakinkan DPRD bahwa program ini memang sangat diperlukan	Sifatnya hanya menambal kekurangan guru dan jumlahnya masih sedikit; usulan penambahan tidak disetujui DPRD	Masih belum terlihat karena sifatnya hanya menambal kekurangan guru	Belum terukur, tetapi seharusnya ada dampaknya untuk peningkatan kualitas karena murid di sekolah yang bersangkutan diajar oleh guru-guru yang memiliki tanggung jawab	Perlunya lobi untuk mendapatkan persetujuan DPRD	Perlunya dukungan anggaran
Bima Mengajar	Dinas Dikpora dan tokoh pendidikan (replikasi)	Dinas Dikpora dan tokoh pendidikan	Dinas Dikpora dan pengelola	Menghadirkan tenaga profesional dari seluruh	APBD	Tidak ada modifikasi	Tidak ada	Banyak yang menilai positif	Program ini berhasil membantu mengatasi	Capaian yang signifikan belum dirasakan, tetapi	Untuk mengajar di wilayah-wilayah	Perlu peningkatan anggaran dan

Kebijakan/ Inovasi Utama	Lembaga/Tokoh			Praktik Pelaksanaan				Dampak Kebijakan/Inovasi			Pelajaran yang Dipetik	
	Penggagas/ Agen Pembaharuan (lembaga/ individu)	Agen Pembaharu- an	Pelaksana	Mekanisme	Pembiayaan	Modifikasi	Hambatan	Alasan Berhasil/ Tidak	Kondisi Pendidikan secara Umum	Kualitas Pembelajaran	Pembelajaran dari Kebijakan/ Inovasi	Usulan Peningkat- an Kualitas Pembela- jaran
	Indonesia Mengajar)		Bima Mengajar	Indonesia untuk mengajar di daerah terpencil					keterbatasan jumlah guru di wilayah terpencil	banyak pihak mengapresiasi	terpencil dibutuhkan semangat khusus dan kegiatan dalam melakukan kegiatan	diseminasi untuk menarik minat para sarjana berkualitas untuk berperan sebagai relawan dan penting untuk tetap melakukan distribusi guru berkualitas ke daerah- daerah terpencil
Rubi (Ruang Untuk Berbagi Ilmu)	Indonesia Mengajar	Pegiat pendidikan di Kabupaten Bima (guru SD, SMP, SMA, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pengajar muda Gerakan Indonesia Mengajar)	Pegiat pendidikan di Kabupaten Bima (guru SD, SMP, SMA, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pengajar muda Gerakan Indonesia Mengajar)	Pelatihan mengenai metode belajar kreatif untuk guru-guru SD. Pelatihan diberikan oleh relawan pendidikan dari ibu kota yang ingin berbagi ilmu, keahlian, dan keterampilan kepada guru- guru yang selanjutnya	Donatur, APBD	Tidak ada modifikasi	Tidak ada	Banyak yang menilai positif	Belum terlihat, tetapi dapat membantu meningkatkan kualitas guru SD	Belum terlihat, tetapi dapat membantu meningkatkan kualitas guru SD	Gerakan sosial untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan asas kerelaan dan bermodalkan semangat pendidikan	Perlunya dukungan anggaran

Kebijakan/ Inovasi Utama	Lembaga/Tokoh			Praktik Pelaksanaan				Dampak Kebijakan/Inovasi		Pelajaran yang Dipetik		
	Penggagas/ Agen Pembaharuan (lembaga/ individu)	Agen Pembaharu- an	Pelaksana	Mekanisme	Pembiayaan	Modifikasi	Hambatan	Alasan Berhasil/ Tidak	Kondisi Pendidikan secara Umum	Kualitas Pembelajaran	Pembelajaran dari Kebijakan/ Inovasi	Usulan Peningkat- an Kualitas Pembela- jaran
				diharapkan menjadi penggerak di wilayahnya								
Kelas Inspirasi	Dinas Dikpora dan pengelola Bima Mengajar	Dinas Dikpora dan pengelola Bima Mengajar	Dinas Dikpora	Melakukan kegiatan berbagi para tokoh yang sukses di profesinya masing- masing melalui sekolah- sekolah dan masyarakat umum yang dibagi berdasarkan gugus	APBD	Tidak ada modifikasi	Tidak ada hambatan yang berarti; relawannya justru cukup banyak	Manfaatnya dirasakan oleh anak- anak di sekolah dan dalam masyarakat	Memberi inspirasi kepada guru bahwa dengan keterbatasan dana pemerintah, masih ada yang mau mengajar dengan semangat mengajar yang tinggi	Belum bisa diukur	Memberi pengalaman bagi para murid bahwa setiap profesi bisa mengalami kesuksesan seperti pengalaman orang-orang yang pernah sukses	Perlu dukungan berbagai pihak untuk meningkat- kan wawasan murid
Wahana Edukasi Bima	Indonesia Mengajar		Dinas Dikpora	Memperkenal- kan berbagai wahana/ sarana di kota kepada murid SD dari pelosok Bima melalui kegiatan studi wisata dalam rangka menambah wawasan serta ilmu pengetahuan	Donatur publik dan APBD	Tidak ada modifikasi	Mencari relawan fasilitator dan donatur		Memberi inspirasi kepada guru untuk mengajar dengan baik		Murid dapat belajar banyak hal melalui berbagai metode	Perlu dukungan berbagai pihak untuk meningkat- kan wawasan murid

Kebijakan/ Inovasi Utama	Lembaga/Tokoh			Praktik Pelaksanaan				Dampak Kebijakan/Inovasi		Pelajaran yang Dipetik		
	Penggagas/ Agen Pembaharuan (lembaga/ individu)	Agen Pembaharu- an	Pelaksana	Mekanisme	Pembiayaan	Modifikasi	Hambatan	Alasan Berhasil/ Tidak	Kondisi Pendidikan secara Umum	Kualitas Pembelajaran	Pembelajaran dari Kebijakan/ Inovasi	Usulan Peningkat- an Kualitas Pembela- jaran
				di bidang transportasi, informasi, pendidikan, dan teknologi								
ProDEP	Pemerintah Australia	Pemerintah Australia	Dinas Dikpora	Pemberian pelatihan dan pendampingan oleh pengawas kepada 30 kepala sekolah SMP untuk peningkatan kapasitasnya dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan sekolah secara profesional	Pemerintah Australia	Tidak ada modifikasi	Dalam pelaksanaannya, tidak ada hambatan; hanya saja, pelaksanaan program ini hanya sebentar		Adanya dokumen hasil penyusunan RKJM sekolah; kepala sekolah mengalami peningkatan kapasitas penyusunan rencana	Harusnya berdampak positif karena kemampuan kepala sekolah dalam mengelola sekolah meningkat dan pembagian tanggung jawab dan beban guru menjadi lebih merata sesuai keahlian	Peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan menjadi hal paling penting dalam penyelenggaraan sekolah	-
Membumihkan Alquran	Bupati	Bupati	Sekolah	Mengaji Alquran setiap jam pertama selama 15 menit	Murid/orang tua untuk menyediakan Alquran	Tidak ada modifikasi	Keterbatasan dana untuk menyediakan Alquran; guru belum tentu lancar mengaji		Murid lebih disiplin dan lancar mengaji; guru juga ikut mengaji; jumlah TPG menjadi lebih banyak	-	-	-

Kebijakan/ Inovasi Utama	Lembaga/Tokoh			Praktik Pelaksanaan				Dampak Kebijakan/Inovasi			Pelajaran yang Dipetik	
	Penggagas/ Agen Pembaharuan (lembaga/ individu)	Agen Pembaharu- an	Pelaksana	Mekanisme	Pembiayaan	Modifikasi	Hambatan	Alasan Berhasil/ Tidak	Kondisi Pendidikan secara Umum	Kualitas Pembelajaran	Pembelajaran dari Kebijakan/ Inovasi	Usulan Peningkat- an Kualitas Pembela- jaran
Shalat berjamaah di sekolah	Bupati	Bupati	Sekolah	Melaksanakan shalat berjamaah di sekolah untuk semua murid dan guru muslim	Tidak ada	Tidak ada modifikasi	Tidak semua sekolah memiliki masjid/mushola dan jam sekolah yang harus disesuaikan		Meningkatkan ketakwaan dan kebersamaan	-	-	-
Larangan merokok di lingkungan sekolah	Bupati	Bupati	Sekolah	Larangan merokok di kelas dan lingkungan sekolah; jika guru mau merokok, mereka harus keluar dari gerbang sekolah	Tidak ada	Tidak ada modifikasi	Menegakkan disiplin, termasuk di kalangan guru		Menegakkan disiplin dan menjaga kebersihan	Tidak ada	Menegakkan disiplin bukan hal yang mudah	-
Bimbingan calistung untuk kelas 1-3 SD	Kepala sekolah/UPTD	Kepala sekolah/UPTD	Guru sukarela	Memberikan pelajaran tambahan kepada murid kelas 1-3 SD yang belum mencapai target sekolah dalam kemampuan calistung	Tidak ada	Tidak ada	Kemauan dan ketersediaan waktu guru; kemampuan dan kemauan murid	Meningkatkan kemampuan murid	Meningkatkan kemampuan calistung murid	Meningkatkan kemampuan calistung murid	Sekolah/guru perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok siswa tertentu	Inovasi ini perlu dikembangkan di sekolah-sekolah lain

## LAMPIRAN 12

### Data Sekunder

Data sekunder yang berhasil dikumpulkan dari informan di Kabupaten Bima berbentuk *soft copy*, *hard copy*, dan foto, yaitu terdiri atas:

#### **Soft copy:**

1. Renstra Dikpora Kabupaten Bima 2011–2015 dan 2016–2020
2. Renja Dikpora 2013, 2014, dan 2016
3. LAKIP Dikpora 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dikpora 2015 dan 2016
5. RPJMD Kabupaten Bima 2011–2015
6. Bima Dalam Angka 2015
7. Pembangunan Kabupaten Bima Dalam Angka 2015
8. Statistik Daerah Kabupaten Bima 2015

#### **Hard copy:**

9. Peraturan Bupati Bima No. 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Bima
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
11. Profil Data Pendidikan Kabupaten Bima Tahun Pelajaran 2013/2014
12. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
13. Peningkatan Wawasan Pendidikan Pengurus Komite sekolah, Kemendikbud 2012
14. Data Dewan Pendidikan Kabupaten Bima: Analisis Hasil Pemantauan dan Evaluasi 2016, Program Kerja 2009–2010, UU No. 20 Tahun 2003 (khusus terkait Dewan Pendidikan), surat pernyataan/kesepakatan bersama, komponen dan indikator pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP)
15. Bima Dalam Angka 2013 (hanya data bidang pendidikan)

#### **Foto:**

16. Nilai ujian akhir SMPN A,
17. Nilai ujian akhir SMPN B,
18. Nilai ujian akhir SDN A, dan
19. Nilai ujian akhir SDN B

## LAMPIRAN 13

Tabel A7. Diagram Proses Pemetaan Pemangku Kepentingan

Tahapan	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan
1. Tahap Persiapan	Merancang penelitian: mencari metode yang tepat untuk menjawab tujuan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengacu pada ToR</li> <li>- Pemilihan nama sekolah tepat waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunggu kepastian sekolah sampel dari tim INOVASI</li> <li>- Menerjemahkan ToR ke dalam rancangan penelitian sehingga diperoleh metode pengumpulan dan analisis data yang tepat</li> <li>- Memilih pendekatan analisis yang paling tepat</li> </ul>
	Menyusun instrumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengacu pada tujuan penelitian yang jelas sudah dirumuskan</li> <li>- Metode penelitian (pengumpulan dan analisis data sudah disetujui bersama)</li> <li>- Pembagian tugas di antara anggota tim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyamakan pemahaman tentang definisi kunci, misalnya hasil pembelajaran, kualitas, tolok ukur dsb.</li> <li>- Penyesuaian pertanyaan atau data yang ingin digali dengan waktu yang tersedia</li> <li>- Menyesuaikan pertanyaan dan instrumen dengan tujuan penelitian dan informan</li> <li>- Menyesuaikan pertanyaan dan instrumen dengan kelompok informan</li> </ul>
	Pelatihan dan uji coba instrumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi uji coba harus ditetapkan sejak awal</li> <li>- Izin kunjungan sudah diterima dari pihak berwenang di lokasi uji coba</li> <li>- Mendapat daftar pemangku kepentingan dan nomor kontakannya</li> <li>- Penyiapan logistik yang relevan dengan kebutuhan: pengumpulan data, transportasi, dan komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan waktu pelaksanaan yang dapat dihadiri oleh seluruh anggota tim</li> <li>- Sebagian pemangku kewenangan yang dihubungi menginginkan pemberitahuan lebih awal</li> <li>- Sebagian pemangku kepentingan tidak merespons permohonan uji coba instrumen</li> <li>- Waktu untuk mengontak pemangku kepentingan yang dilibatkan terlalu singkat</li> <li>- Instrumen wawancara mendalam terlalu banyak; supaya tidak terlalu menyita waktu informan dan sesuai jadwal/waktu untuk uji coba, tidak semua pertanyaan ditanyakan kepada satu informan sehingga tidak bisa diperkirakan secara menyeluruh kesesuaian pertanyaan dengan informan</li> <li>- Kondisi sekolah dan murid daerah uji coba yang relatif maju berbeda cukup jauh dengan wilayah studi sehingga terdapat kemungkinan bahwa ada sesuatu yang tidak tertangkap untuk penyesuaian instrumen</li> <li>- FGD kabupaten tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu sehingga hanya bisa didiskusikan di antara peneliti</li> </ul>
	Revisi instrumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai tujuan penelitian</li> <li>- Mengakomodasi hasil uji coba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak semua instrumen diujicobakan (FGD kabupaten)</li> <li>- Keterbatasan waktu revisi karena menjelang libur Lebaran</li> </ul>
	Menyediakan perlengkapan studi lapangan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi semua kebutuhan studi lapangan</li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbanyak instrumen</li> <li>- Suvenir untuk informan</li> <li>- <i>Informed consent</i></li> </ul>		

Tahapan	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat izin penelitian</li> <li>- Surat tugas SMERU</li> <li>- Surat untuk informan lembaga</li> <li>- Perlengkapan FGD</li> </ul>		
2. Tahapan Pengumpulan Data	Menyusun daftar awal pemangku kepentingan dan nomor kontak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemangku kepentingan mempunyai kaitan erat dengan pendidikan tingkat dasar di berbagai tingkat pemerintahan (kabupaten, kecamatan, dan sekolah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencari dan menentukan pemangku kepentingan dari pihak/lembaga nonpemerintah</li> <li>- Mencari nomor kontak pemangku kepentingan</li> </ul>
	Mengontak informan kunci	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan sebelum tim melakukan studi lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meyakinkan informan yang belum ditemui agar bersedia menerima/diwawancarai tim peneliti serta memfasilitasi kegiatan wawancara kelompok</li> <li>- Menentukan dan menyesuaikan waktu antarinforman</li> <li>- Waktu untuk mengontak tersedia di sekitar libur Lebaran</li> </ul>
	Melakukan wawancara mendalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus direkam</li> <li>- Informan harus mengisi <i>informed consent</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertepatan dengan perayaan ulang tahun Kabupaten Bima selama dua hari sehingga sulit menemui informan, terutama dari lembaga pemerintah</li> <li>- Meminta waktu wawancara kepada informan dan menyesuaikan dengan jadwal tim peneliti</li> <li>- Mencari alamat informan</li> <li>- Pedoman pertanyaan cukup banyak sehingga membutuhkan waktu wawancara yang cukup lama</li> <li>- Hampir semua informan adalah ketua atau memegang jabatan penting di lembaga masing-masing sehingga sebagian sulit ditemui, memiliki waktu terbatas untuk wawancara, atau ada gangguan saat wawancara (telepon, ditemui/ditunggu pihak lain)</li> <li>- Menjelaskan dan mengisi <i>informed consent</i> cukup memakan waktu, apalagi jika informan terlebih dahulu membaca secara detail isi <i>informed consent</i></li> <li>- Kondisi politik lokal menjelang mutasi jabatan (enam bulan sejak bupati baru menjabat) menyebabkan proses penggalian informasi pada beberapa informan kurang maksimal (ada yang cenderung normatif atau penuh kekecewaan)</li> <li>- Instrumen penelitian terlalu memaksakan agar semua pertanyaan ditanyakan kepada semua informan, sementara jumlah pertanyaannya cukup banyak; akibatnya, peneliti kurang bisa menggali secara mendalam satu atau dua isu yang benar-benar dikuasai oleh informan</li> </ul>
	Melakukan wawancara kelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus direkam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertepatan dengan perayaan ulang tahun Kabupaten Bima yang melibatkan sekolah dalam upacara dan pawai selama 2 hari.</li> </ul>

Tahapan	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta harus sesuai dengan pedoman penelitian</li> <li>- Peserta harus mengisi <i>informed consent</i></li> <li>- Untuk peserta murid, harus ada <i>informed consent</i> dari orang tua/wali murid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh rangkaian kegiatan wawancara mendalam dan wawancara kelompok mengganggu kegiatan sekolah dari pagi hingga setelah jam sekolah, sementara jika dilakukan di luar jam sekolah, pihak sekolah keberatan</li> <li>- Pihak sekolah tidak selalu mematuhi permintaan peneliti dalam menentukan peserta wawancara kelompok orang tua, seperti (i) mengundang orang tua dari murid yang tidak menjadi peserta wawancara kelompok murid dengan alasan penguasaan bahasa Indonesia yang lemah (sebagai solusinya, karena diketahui saat wawancara kelompok hampir selesai, peneliti melakukan verifikasi melalui wawancara tambahan terhadap dua orang tua murid peserta wawancara kelompok yang tidak diundang sekolah), (ii) memasukkan guru yang anaknya menjadi murid di sekolah tersebut (sebagai solusinya, karena diketahui pada awal pelaksanaan wawancara kelompok, peneliti meminta guru tersebut untuk tidak mengikuti wawancara kelompok), (iii) mengundang orang tua dari beberapa tingkatan kelas (sebagai solusinya, karena diketahui saat wawancara kelompok belum dimulai dan rumah orang tua murid tidak jauh dari sekolah, peneliti meminta peserta diganti sesuai dengan kriteria yang ditetapkan)</li> <li>- Gangguan dari murid lain yang tidak menjadi peserta, khususnya yang kelasnya digunakan untuk wawancara kelompok; obrolan mereka di luar kelas juga mengganggu kualitas rekaman</li> <li>- Menjelaskan dan mengisi <i>informed consent</i> cukup memakan waktu, apalagi untuk persetujuan orang tua murid yang tidak punya banyak waktu</li> </ul>
Melakukan FGD tingkat kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus direkam</li> <li>- Peserta harus sesuai dengan pedoman penelitian</li> <li>- Peserta harus mengisi <i>informed consent</i></li> <li>- FGD sebaiknya dilakukan di akhir kegiatan lapangan karena sifatnya mengonfirmasi temuan awal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempersiapkan temuan awal lapangan dalam bentuk grafik sesuai dengan pedoman FGD</li> <li>- Penentuan waktu FGD: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditentukan oleh ketersediaan waktu lembaga mitra yang memfasilitasi (Bappeda) dan ketersediaan waktu informan kunci yang akan diundang (Dinas Dikpora, sekda, dan DPRD)</li> <li>• Adanya rencana lokakarya tim INOVASI di Kabupaten Bima menyebabkan FGD tidak bisa dilakukan di akhir kegiatan lapangan sehingga temuan awalnya belum meliputi informasi dari semua responden (rencana lokakarya tim INOVASI Rabu–Kamis, 27–28 Juli; waktu pada Jumat, 29 Juli, terlalu pendek dan terpotong Jumat; tim peneliti berencana kembali ke Jakarta Sabtu, 30 Juli, sehingga FGD dilaksanakan pada 26 Juli).</li> </ul> </li> <li>- FGD memakan waktu yang sangat lama dan didahului dengan menunggu sebagian peserta yang tidak hadir tepat waktu (jumlah waktu keseluruhan 5,5 jam). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya agar peserta bersedia bertahan dan terlibat sampai akhir FGD—pada kasus di Bima, semua peserta bertahan sampai akhir acara; ada dua peserta yang sempat meninggalkan acara karena harus hadir dalam acara lain tetapi segera kembali</li> </ul>	

Tahapan	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan
	Membuat catatan wawancara	- Sebaiknya dilakukan segera setelah melakukan wawancara	<p>bergabung dalam FGD begitu acara mereka dapat ditinggalkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Informed consent</i>: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan dan mengisi <i>informed consent</i> cukup memakan waktu</li> <li>• Menjelaskan kepada dan mengisi <i>informed consent</i> oleh peserta yang telat datang akan mengganggu jalannya FGD</li> <li>• Ada beberapa peserta yang keberatan untuk mengisi <i>informed consent</i> dengan alasan kalimatnya menggunakan bahasa hukum dan kehadiran di forum tersebut sudah menunjukkan kesediaan untuk terlibat dalam kegiatan penelitian sehingga tidak perlu pernyataan tertulis lagi</li> </ul> </li> </ul> <p>- Ketersediaan waktu untuk membuat catatan wawancara selama melakukan studi lapangan terbatas karena tim sibuk dengan pengumpulan informasi/data, membuat rencana/janji wawancara, dan persiapan wawancara kelompok serta FGD</p>
	Membuat transkrip wawancara	- Dilakukan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencari orang yang bersedia membuat transkrip</li> <li>- Hasil rekaman tidak selalu berkualitas bagus; jika ada suara agak berisik (suara anak sekolah, suara kendaraan bermotor yang lewat), hasil rekaman kurang jernih dan ada pembicaraan yang kurang jelas</li> </ul>
3. Tahapan Analisis Data	Menyusun matriks analisis	Matriks disusun berdasarkan masing-masing informan atau kelompok informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunannya cukup menyita waktu</li> <li>- Tidak bisa diselesaikan saat di lapangan</li> </ul>
	Analisis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan hasil diskusi tim peneliti</li> <li>- Berdasarkan matriks analisis</li> <li>- Berdasarkan catatan lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskusi hanya dapat dilakukan saat penelitian lapangan karena anggota tim sibuk dengan tugas menyelesaikan catatan lapangan dan persiapan studi lapangan berikutnya</li> <li>- Saat analisis akan dimulai, matriks analisis belum selesai seluruhnya</li> <li>- Saat analisis akan dimulai, catatan lapangan belum selesai seluruhnya</li> </ul>
4. Pembuatan Laporan	Penyusunan laporan kabupaten dan sintesis	Semua data selesai dianalisis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu untuk membuat laporan kabupaten terbatas, yakni hanya beberapa hari setelah kembali dari lapangan; padahal beberapa hari sebelumnya tim harus menyelesaikan hasil FGD kabupaten dan matriks komunikasi</li> <li>- Saat membuat laporan kabupaten, matriks analisis sebagai pendukung, belum selesai seluruhnya</li> <li>- Saat membuat laporan kabupaten, catatan lapangan sebagai pendukung, belum selesai seluruhnya</li> </ul>

## LAMPIRAN 14

### Status Guru di Kabupaten Bima

Berdasarkan status kepegawaiannya, guru di Kabupaten Bima terdiri atas tiga golongan, yaitu guru PNS, guru honorer daerah (honda), dan guru sukarela. Guru honda adalah guru yang dikontrak dan digaji oleh pemda. Jumlah guru honda relatif sedikit dan mereka mendapat honorarium yang relatif minim dari pemda kabupaten, yaitu Rp300.000 per bulan. Oleh karena itu, guru honda terkadang disebut juga sebagai guru sukarela. Sementara itu, guru sukarela merupakan guru yang diangkat oleh sekolah dan mendapat honor dari sekolah yang disisihkan dari dana BOS. Honorarium guru sukarela sangat minim, yaitu berkisar Rp300.000–Rp475.000 per tiga bulan, tergantung pada kebijakan sekolah dan jumlah jam mengajar. Sebenarnya, selain ketiga golongan guru tersebut, di Bima terdapat guru kontrak khusus, tetapi jumlahnya sangat sedikit, yaitu hanya 30 orang. Mereka merupakan guru honda yang dinilai berkualitas dan ditempatkan di daerah tertentu yang termasuk 3T (terbelakang, tertinggal, terisolasi). Mereka dikontrak selama satu tahun dengan diberi honor Rp1,5 juta per bulan ditambah tunjangan 3T sebesar Rp1 juta per bulan.

Guru PNS yang lulus sertifikasi guru mendapat tunjangan sebesar satu kali gaji pokok. Guru PNS yang ditempatkan di daerah terpencil dan mendapatkan tunjangan daerah terpencil mendapat tambahan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok. Tidak semua guru PNS yang ditempatkan di daerah terpencil otomatis mendapatkan tunjangan daerah terpencil. Tunjangan tersebut diperoleh melalui mekanisme pengajuan oleh Dinas Dikpora kabupaten ke pusat setiap tahun. Guru yang sebelumnya mendapatkan tunjangan bisa menjadi tidak mendapatkannya meskipun masih bertugas di sekolah yang sama, dan sebaliknya, guru yang sebelumnya tidak menerima bisa menjadi penerima.

## The SMERU Research Institute

Telepon : +62 21 3193 6336

Faksimili : +62 21 3193 0850

Surel : smeru@smeru.or.id

Situs web : www.smeru.or.id

Facebook : @SMERUInstitute

Twitter : @SMERUInstitute

YouTube : The SMERU Research Institute

